

**AKSI NON-KEKERASAN GERAKAN *STANDING TOGETHER* DALAM MELAWAN
PENDUDUKAN ISRAEL DI PALESTINA (2020-2024)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh :

RIZKIYAH HIDAYATI AL-MUNAWARAH

21323088

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**AKSI NON-KEKERASAN GERAKAN *STANDING TOGETHER* DALAM MELAWAN
PENDUDUKAN ISRAEL DI PALESTINA (2020-2024)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh :

RIZKIYAH HIDAYATI AL-MUNAWARAH

21323088

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Aksi Non-Kekerasan Gerakan *Standing Together* Dalam Melawan Pendudukan Israel di Palestina (2020-2024)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

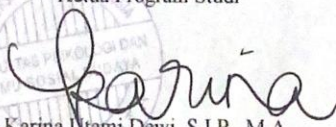
Pada Tanggal

17 April 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

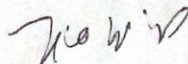
Ketua Program Studi


Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

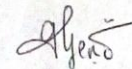
Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.



2. Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.



3. Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 4 Maret 2025



Rizkiyah Hidayati Al-Munawarah

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	15
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	15
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	15
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	15
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	15
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONFLIK YANG TERJADI ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA SELAMA TAHUN 2020-2024	17
2.1 Kekerasan Yang Dilakukan oleh Israel Terhadap Warga Palestina	17

2.2	Perkembangan Organisasi dan Gerakan Sosial Pro-Palestina yang Berada di Israel..	25
2.2.1	<i>Fase Awal (1978) Perdamaian Konflik Israel-Palestina.....</i>	<i>26</i>
2.2.2	<i>Fase Menengah (1993) Perdamaian Konflik Israel-Palestina.....</i>	<i>28</i>
2.2.3	<i>Fase Kontemporer (2000-Sekarang) Perdamaian Konflik Israel-Palestina.....</i>	<i>31</i>
2.3	Profil Standing Together Sebagai Gerakan Sosial Pro-Palestina.....	35
BAB III ANALISIS AKSI NON-KEKERASAN GERAKAN STANDING TOGETHER BERDASARKAN TEORI		44
3.1	Analisis Aksi Non-Kekerasan <i>Standing Together</i> berdasarkan Kategori Protes dan Persuasi	44
3.2	Analisis Aksi Non-Kekerasan <i>Standing Together</i> berdasarkan Kategori Non-kooperasi	47
3.3	Analisis Aksi Non-Kekerasan <i>Standing Together</i> berdasarkan Kategori Intervensi Non-Kekerasan	48
3.4	Tantangan dan Ancaman Terhadap gerakan <i>Standing Together</i>.....	50
BAB IV PENUTUP		57
4.1	Kesimpulan	57
4.2	Rekomendasi.....	60
DAFTAR PUSTAKA		61

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
BDS	: <i>Boycott, Divestment, Sanctions</i>
DK PBB	: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRW	: <i>Human Rights Watch</i>
ICC	: <i>International Criminal Court</i>
ICJ	: <i>International Court of Justice</i>
KEMENLU RI	: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
OCHA	: <i>Office for the Coordination of Humanitarian Affairs</i>
OKI	: Organisasi Kerjasama Islam
PACBI	: <i>Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RUU	: Rancangan Undang-Undang
UN	: <i>United Nations</i>
UNRWA	: <i>United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
CCW	: <i>Convention on Certain Conventional Weapons</i>
ICAHD	: <i>Israeli Committee Against House Demolitions</i>

CFP : *Combatants for Peace*

PCFF : *Parents Circle/Families Forum*

ABSTRAK

Serangan Hamas yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2023 membuat konflik antara Israel dan Palestina semakin memanas, dan membuat konflik antara keduanya tidak menemukan titik terang penyelesaian dan juga perdamaian, seperti sebuah mimpi yang berbentuk ilusi. *Standing Together* menjadi sebuah gerakan sosial yang bergerak tanpa menggunakan kekerasan untuk melawan kekejaman yang dilakukan oleh para pasukan Israel, termasuk menentang pendudukan ilegal yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. *Standing Together* juga merupakan sebuah gerakan sosial yang mencakup kolaborasi antara Yahudi dan Palestina di Israel. Dimana, tujuan *Standing Together* sendiri adalah untuk memperjuangkan hak-hak warga Palestina yang mengalami penindasan dan juga pengucilan melalui sebuah aksi non-kekerasan seperti pawai, demonstrasi, parade, dan vigil. Dalam penelitian ini, akan menjelaskan terkait peran yang dilakukan oleh *Standing Together* dalam melawan pendudukan Israel di Palestina, dengan menggunakan teori yang berjudul *The Politics of Nonviolent Action* oleh Gene Sharp, untuk menjabarkan usaha dan juga upaya yang dilakukan oleh *Standing Together* dalam melindungi rakyat Palestina dari kekejaman Israel, dan menentang segala bentuk kejahatan Israel.

Kata Kunci : Israel-Palestina, *Standing Together*, Pendudukan, Non-Kekerasan

ABSTRACT

The Hamas attack on October 7, 2023 has escalated the conflict between Israel and Palestine, and made the conflict between the two unable to find a bright spot for resolution and peace, like an illusory dream. *Standing Together* is a social movement that mobilizes non-violently against the atrocities committed by Israeli forces, including against Israel's illegal occupation of the Palestinian territories. *Standing Together* is also a social movement that includes collaboration between Jews and Palestinians in Israel. *Standing Together's* goal is to fight for the rights of oppressed and excluded Palestinians through nonviolent actions such as marches, demonstrations, parades and vigils. In this research, we will explain the role of *Standing Together* in resisting the Israeli occupation of Palestine, using the theory of *The Politics of Nonviolent Action* by Gene Sharp, to describe the efforts of *Standing Together* in protecting the Palestinian people from Israeli atrocities, and opposing all forms of Israeli crimes.

Keywords: Israel-Palestine, *Standing Together*, Occupation, Nonviolence

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik adalah sebuah permasalahan sosial yang sering dihadapi oleh banyak negara dan kebanyakan mengarah pada situasi yang mengarah pada perpecahan dan menjadikan konflik sebagai suatu permasalahan yang berkepanjangan. Biasanya, konflik terjadi ketika adanya sebuah interaksi antara dua atau lebih suku atau agama dalam suatu wilayah pemukiman (Simanjorang dkk. 2023). Salah satu konflik yang masih selalu menjadi perbincangan hangat di belahan dunia adalah konflik antara Israel dan Palestina. Dulu, Turki Utsmani pernah menguasai wilayah Palestina dalam waktu yang sangat lama, yaitu selama sekitar tiga abad, bersamaan dengan wilayah Timur Tengah lainnya. Kekuasaan ini berakhir pada tahun 1917 setelah Turki Utsmani kalah dalam perang, dan Palestina pun jatuh ke tangan Inggris. Namun, seolah-olah Palestina baru benar-benar berpindah dari tangan umat Arab-Muslim kepada bangsa Yahudi ketika mereka secara resmi mendeklarasikan berdirinya negara Israel pada 15 Mei 1948 (Muchsin 2015, 9). Antara tahun 1948 hingga 1968, Israel sudah menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat, baik di Palestina maupun di kawasan Timur Tengah secara umum. Hal ini terbukti saat terjadi Perang Enam Hari tahun 1967, di mana Israel berhadapan dengan sejumlah negara Islam seperti Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, Arab Saudi, Irak, dan Palestina. Meski banyak negara Islam yang terlibat, mereka tidak mampu berbuat banyak, dan justru kekalahan itu memperkuat status Israel sebagai negara merdeka melalui pendudukan wilayah dari negara-negara tersebut (Muchsin 2015, 9)

Sejak saat itulah konflik antara Israel dan Palestina dimulai, dan sudah sejak lama pula konflik antara Israel dan Palestina ini tidak kunjung usai. Tiap tahunnya, masalah ini selalu menjadi perhatian publik dan perlu penanganan serius untuk mengatasi konflik antara keduanya. Selama beberapa dekade panjang, rakyat Palestina menderita dengan segala bentuk penindasan, ketidakadilan, perampasan hak-hak dasar, dan apartheid. Berdasarkan angka resmi, selama periode antara Januari 2000 – September 2023, Israel telah membunuh sebanyak 11.299 penduduk Palestina dan melukai 156.768 lainnya, dimana sebagian besar adalah penduduk sipil (Kusuma 2024). Permasalahan ini dipicu oleh kebijakan sepihak yang dilakukan oleh Israel yang akan menggusur warga Palestina dari wilayah Sheikh Jarrah, Yerusalem, yang kemudian memunculkan aksi kekerasan dan berujung pada pertempuran antara Hamas dan Militer Israel (Muhamad, t.t.). Sangat disayangkan, pemerintah AS dan juga sekutunya tidak memperhatikan penderitaan rakyat Palestina. Mereka hanya peduli dan juga menyesali para tentara Israel yang terbunuh pada 7 Oktober, bahkan tanpa mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pemerintah AS juga memberikan dukungan finansial dan militer terhadap pembantaian Israel kepada para penduduk sipil Palestina dan agresi besar-besaran di Jalur Gaza (Kusuma 2024).

Dikutip dari laman resmi rri.co.id, dikatakan bahwa pada pagi hari tanggal 7 Oktober 2023, pejuang Palestina pimpinan Hamas melancarkan invasi besar-besaran kepada Israel melalui Jalur Gaza. Barisan pejuang Palestina menerobos tembok pembatas Gaza-Israel dan memaksa masuk melalui penyeberangan perbatasan Gaza. Selain daripada itu, Hamas juga menuju pemukiman terdekat dan instalasi militer Israel, dan menamai penyerbuan ini dengan sebutan operasi “Taufan Al-Aqsa”. Hal ini menjadi konflik langsung pertama yang terjadi di wilayah Israel sejak Perang Arab-Israel di tahun 1948. Permusuhan yang dilakukan oleh Hamas dimulai dengan memberikan serangan ribuan roket terhadap Israel. Hamas juga mengklaim

bahwasanya telah menembakkan 5.000 roket yang diikuti masuknya sejumlah kendaraan ke wilayah Israel itu sendiri (Nugroho 2023). Setelah menerima serangan dari Hamas, membuat Israel kecolongan (Nugroho 2023). Setidaknya, sekitar 240 sandera berhasil dibawa Hamas ke kawasan Gaza baik dari warga sipil dan militer dari serangan tersebut. Setelah itu, pemerintah Israel membalas perbuatan Hamas dengan pernyataan perang dan melakukan Operasi Pedang Besi ke utara Jalur Gaza, Palestina. Israel menggelar serbuan artileri udara yang menargetkan banyak tempat, mulai dari rumah sakit hingga gedung-gedung pemukiman. Rumah sakit Indonesia yang berada di utara Jalur Gaza menjadi sasaran dari Israel. Setelah 49 hari terjadi pertempuran antara Hamas dan Israel dengan lebih dari 15.000 warga Gaza tewas (Nugroho 2023), Hamas dan Israel sepakat untuk menggelar jeda kemanusiaan (Nugroho 2023) .

Dimana, jeda kemanusiaan ini berlangsung selama 7 hari dari tanggal 24 November hingga 1 Desember 2023. Jeda kemanusiaan ini juga menghasilkan pembebasan 105 warga sipil Israel dari tawanan Hamas (Nugroho 2023). Laporan dari Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, pada 29 Desember, mencatat terdapat 21.320 orang tewas (Nugroho 2023) dan 55.603 orang terluka (Nugroho 2023). Bahkan lebih dari 7.000 warga Gaza masih dinyatakan hilang dan dikhawatirkan ikut tewas (Nugroho 2023). Untuk kawasan Tepi Barat Palestina sendiri, jumlah korban tewas akibat serangan Israel mencapai 316 orang dan korban yang mengalami luka-luka sebanyak 3.800 orang (Nugroho 2023). Sedangkan, menurut lembaga militer dan badan keamanan sosial Israel, jumlah korban di Israel pada gencatan yang terjadi sejak 7 Oktober mencapai 1.139 orang (Nugroho 2023). Sementara, jumlah tentara Israel yang tewas sejak serangan darat Israel 31 Oktober mencapai 167 tentara dengan korban luka-luka sebanyak 921 orang (Nugroho 2023). Pelanggaran serta kejahatan Israel telah didokumentasikan oleh banyak organisasi PBB serta kelompok Hak Asasi Manusia internasional, termasuk *Amnesty*

International dan *Human Rights Watch*, bahkan didokumentasikan oleh kelompok hak asasi manusia Israel. Akan tetapi, laporan dan kesaksian ini diabaikan oleh Israel. Sebab, Israel belum dapat dimintai keterangan pertanggungjawaban. Selain daripada itu, Pemerintah Amerika dan sekutu-sekutunya di Barat memperlakukan Israel sebagai sebuah negara yang kebal hukum; memberikan mereka perlindungan untuk terus memperpanjang kejahatan pendudukan dan menindas orang-orang Palestina, membiarkan Israel melakukan perbuatan eksploitasi untuk mengambil lebih banyak tanah Palestina dan melakukan Yahudisasi terhadap tempat-tempat suci yang berada di Palestina.

Setelah militan Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023, menimbulkan banyak reaksi dari berbagai arah, diantaranya adalah respon yang dikeluarkan oleh Indonesia melalui Menteri Luar Negeri terkait serangan Hamas ke Israel, meliputi: 1) Indonesia merasa prihatin atas meningkatnya konflik antara Palestina dan Israel. 2) Indonesia meminta agar kekerasan segera dihentikan untuk mencegah semakin banyaknya korban jiwa. 3) Menurut Indonesia, akar utama dari pertempuran yang terjadi ini adalah pendudukan wilayah Palestina yang dilakukan oleh Isral, dan hal tersebut harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh PBB (Setiawan 2024, 5). Reaksi berikutnya muncul dari DK PBB (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dimana, reaksi DK PBB terhadap invasi yang terjadi antara Hamas dan Israel ini adalah mengeluarkan sebuah resolusi yang mengajukan sebuah permintaan agar segera menghentikan pertempuran antara Israel dan Hamas, dengan tujuan untuk membuka akses bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza (Jabir 2024, 9). Meski DK PBB telah menyerukan gencatan senjata, DK PBB kembali gagal mencapai kesepakatan untuk menghentikan perang dan mengadopsi resolusi terkait gencatan senjata di Gaza, Palestina, akibat penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat dan Inggris. Resolusi tersebut sebenarnya bertujuan untuk mengakhiri konflik

antara Israel dan Hamas. Upaya negosiasi untuk mencapai gencatan senjata dilakukan demi meredakan kekerasan dan konflik di wilayah Palestina. Namun, proses perundingan ini sering kali menemui jalan buntu karena perbedaan pendapat mendasar antara kedua pihak mengenai isu-isu yang perlu diselesaikan. Kegagalan negosiasi ini dinilai terjadi karena kedua belah pihak tidak berhasil menemukan titik temu yang memuaskan bagi masing-masing (Jabir 2024, 9).

Selain daripada respon yang dikeluarkan oleh Indonesia melalui Menteri Luar Negeri dan juga DK PBB, reaksi lain muncul dari para pemimpin gerakan sosial akar rumput Yahudi-Arab, yaitu *Standing Together* (Emma Sarran Webster 2024). *Standing Together* adalah gerakan progresif yang berakar pada komunitas yang mengorganisir warga Yahudi dan Palestina di Israel untuk menentang pendudukan serta memperjuangkan perdamaian, kesetaraan, keadilan sosial, dan iklim. Dengan lebih dari 5.000 anggota, ini merupakan gerakan terbesar di Israel. Sebagai respons terhadap perbuatan Hamas pada 7 Oktober dan serangan balasan Israel, *Standing Together* menjadi penggerak utama dalam protes yang mendesak gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan. Inisiatif-inisiatif mereka memperkuat kolaborasi antara Yahudi dan Palestina di Israel, seperti penyelenggaraan Jam Tangan Solidaritas di berbagai kota, serta memastikan bantuan untuk warga Gaza. Penjaga Kemanusiaan Gabungan Yahudi-Palestina yang melindungi truk bantuan dari kekerasan pemukim menarik perhatian polisi dan dunia internasional, memungkinkan pengiriman bantuan dengan aman (VORTRAG 2024). Setelah 7 Oktober, polisi Israel membatasi hak masyarakat untuk melakukan protes dan menggunakan kebebasan sipil mereka. Hampir tidak mungkin untuk mendapatkan izin untuk berdemonstrasi. Itulah sebabnya, sepanjang bulan Oktober dan November, sebagian besar aksi yang dilakukan oleh gerakan perdamaian, termasuk *Standing Together* tidak selalu berupa kegiatan pawai dan demonstrasi. Sebaliknya, hal yang mereka lakukan untuk menjalankan aksi protes tersebut

adalah menggantungkan poster-poster di jalanan bertuliskan “Hanya Perdamaian yang Akan Membawa Keamanan”. Selanjutnya, kesempatan untuk mengorganisir protes yang lebih besar baru dapat dilaksanakan pada bulan Desember. Dimana, *Standing Together* membawa ratusan orang ke sebuah demonstrasi di Haifa pada tanggal 16 Desember, dan kemudian seribu orang lebih berada di sebuah demonstrasi yang dilaksanakan di Tel Aviv pada tanggal 28 Desember (Jewish Voice for Labour 2024).

Disebutkan dalam *Theory of Change Standing Together*, mereka mengatakan bahwasanya mereka selama ini berusaha untuk menghadirkan sebuah solusi alternatif dan praktis yang dapat melayani kepentingan semua orang yang tinggal di wilayah Israel dan Palestina. Mereka juga berusaha untuk menjadikan segala bentuk alternatif yang mereka lakukan ini berada di pusat agenda publik melalui beberapa aksi yang dilakukan yaitu protes, pemogokan, kampanye virtual, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa misi utama gerakan *Standing Together* tidak hanya berfokus pada perjuangan ideologis, melainkan juga pada penciptaan perubahan yang nyata dan berkelanjutan demi tercapainya keadilan serta perdamaian bagi semua pihak. Dengan menentang dominasi kekuasaan Israel atas rakyat Palestina, gerakan ini menegaskan bahwa keamanan sejati hanya dapat terwujud melalui pengakuan atas hak-hak yang setara bagi seluruh penduduk di kawasan tersebut. Maka dari itu, penting untuk merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan peran, pendekatan, serta tantangan yang dihadapi *Standing Together* dalam mewujudkan misi tersebut (Standing Together 2019).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Aksi Non-Kekerasan yang dilakukan oleh Gerakan *Standing Together* dalam Melawan Pendudukan Israel di Palestina pada tahun 2020-2024 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami terkait posisi *Standing Together* itu sendiri di Israel dan Palestina. Selain itu juga, penelitian ini akan banyak mengeksplorasi segala bentuk usaha yang dilakukan oleh *Standing Together* dalam melawan pendudukan Israel di Palestina.

1.4 Cakupan Penelitian

Konflik antara Israel dan Palestina bukanlah suatu permasalahan baru. Namun konflik antara Israel dan Palestina hingga detik ini belum menemukan titik terang penyelesaian dan perdamaian. Permasalahan ini telah banyak merenggut hak asasi setiap individu rakyat Palestina, mulai dari anak-anak, hingga masyarakat sipil sekalipun. Tidak hanya merenggut HAM (Hak Asasi Manusia), melainkan Israel juga telah menghancurkan segala fasilitas dan infrastruktur yang berada di Palestina. Sehingga, dapat dikatakan bahwasanya Israel telah banyak melanggar peraturan hukum, salah satunya adalah hukum internasional.

Dalam merespon permasalahan yang terjadi antara Israel dan Palestina, *Standing Together* sebagai sebuah gerakan non-kekerasan, melakukan beberapa kegiatan guna melawan pendudukan Israel, yaitu melakukan kampanye dan demonstrasi untuk mencapai tujuan terkait perdamaian, kesetaraan dan juga keadilan sosial bagi para korban. Sejak didirikannya *Standing Together* pada tahun 2015, gerakan sosial ini secara konsisten bekerja sama dengan para aktivis dan kelompok masyarakat sipil untuk mengangkat berbagai isu hak asasi manusia di wilayah Israel dan Palestina. Mereka telah menyelenggarakan demonstrasi yang mengecam pengusuran

paksa di Yerusalem Timur, serta menggalang dukungan publik untuk menentang penggunaan kekuatan mematikan oleh IDF (*Israel Defense Forces*) terhadap para demonstran di sepanjang perbatasan Gaza (ALLMEP, t.t.).

Penelitian ini menggunakan batasan tahun 2020 hingga 2024, dikarenakan pada rentang tahun tersebut permasalahan antara Israel dan Palestina semakin memuncak. Dimana, pada bulan Mei 2021 Israel melakukan penyerangan kepada warga sipil di Sheikh Jarrah Yerusalem Timur dan menyerang warga yang berada di masjid Al-Aqsa (Prawira, Irawan, dan Karen 2021), tahun 2022 Israel melakukan serangan bom di Jalur Gaza (Kusuma 2022), di tahun 2023 terjadi pertempuran antara Hamas dan juga Israel yang berlangsung selama 49 hari yang berlanjut hingga tahun 2024 (Nugroho 2023). Dalam kurun tahun 2020-2024, *Standing Together* semakin aktif dan terlihat dalam berbagai aksi, seperti menentang pengusuran di yerusalem Timur, serta menolak kekerasan yang dilakukan oleh para pasukan Israel terhadap warga sipil Palestina (Ward 2024). Sehingga, korelasi antara tahun didirikannya dengan batasan tahun penelitian yang digunakan adalah bahwa gerakan *Standing Together* telah mengalami perkembangan secara signifikan dan selalu konsisten dalam memperjuangkan terkait perdamaian, keadilan sosial, dan melawan pendudukan yang dilakukan oleh Israel di Palestina.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian yang berjudul *Transnasionalisasi Gerakan Nirkekerasan: Kemunculan Gerakan Boycott, Divestment, dan Sanctions (BDS) Palestina*, dimana penulis mengatakan bahwa dalam merespon okupasi Israel, masyarakat Palestina telah berulang kali melakukan perlawanan menggunakan berbagai metode nirkekerasan. Meskipun gerakan *Boycott, Divestment, dan Sanctions (BDS) Palestina* dapat dipandang sebagai kelanjutan dari upaya perlawanan nirkekerasan sebelumnya, skala dan level kesuksesan yang berhasil dicapai oleh

BDS tergolong baru. Dimana, gerakan BDS ini adalah gerakan unik dalam sejarah perlawanan masyarakat Palestina, karena ia berhasil mengalami proses *scale-up* dan mengubah skala repertoar pertikaiannya dari nasional menjadi internasional. Dalam bentuk barunya sebagai gerakan nirkekerasan transnasional, gerakan BDS mampu melawan pemerintah Israel melalui berbagai *venues* oleh individu-individu di berbagai belahan dunia dengan berbagai macam latar belakang (Darningtyas 2020).

Selanjutnya, penelitian yang berjudul Gerakan Syeikh Ahmad Yasin dan Misi Pembebasan Palestina, dimana penulis menyebutkan bahwasanya gerakan Syeikh Ahmad Yasin ialah Hamas (Harakah Al-Muqawwamah Al-Islamiyah) di Palestina. Hamas merupakan sebuah gerakan yang lahir dari gerakan intifadah yang didirikan oleh Syeikh Ahmad Yasin sebagai upaya untuk melakukan perlawanan terhadap zionis Israel. Hamas juga dapat didefinisikan sebagai gerakan perlawanan islam. Hamas berperan dalam masyarakat untuk bersosialisasi, berinteraksi, penggerak dan pembebasan masyarakat Palestina dari segala konflik dan penjajahan Israel. Gerakan Syeikh Ahmad Yasin sangat berpengaruh dan bermanfaat untuk masyarakat Palestina, karena gerakan tersebut memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan dan bimbingan agama kepada penduduk di jalur Gaza wilayah yang dikuasai Palestina. Maka dapat disimpulkan bahwa gerakan Syeikh Ahmad Yasin dan misi pembebasan Palestina sangat berperan dalam masyarakat untuk bersosialisasi dan berinteraksi serta mewujudkan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan melalui gerakan Hamas (Dian Erawati 2022).

Terakhir, penelitian yang berjudul Analisis Kekuatan Pesan Media Sosial Dalam Gerakan *All Eyes on Raffah*, dimana penulis menyebutkan bahwasanya konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina kembali memanas dengan adanya serangan kejam Israel di kota Raffah, Jalur Gaza. Tagar *#AllEyesOnRaffah* dengan cepat menyebar di seluruh dunia, menciptakan kesadaran

global mengenai situasi mengerikan yang terjadi di Rafah. Banyak gambar-gambar yang memilukan, mulai dari anak-anak yang terluka hingga keluarga yang menangisi hilangnya saudara mereka yang sangat menyentuh hati jutaan orang di seluruh dunia. Gerakan ini tidak hanya menuntut keadilan untuk Rafah, melainkan juga mengangkat kembali isu yang lebih besar, yaitu perjuangan Palestina untuk kemerdekaan dan juga penghormatan terkait hak asasi manusia mereka yang telah direnggut oleh Israel. Para aktivis menyerukan dukungan untuk menghentikan pendudukan ilegal yang dilakukan oleh Israel di Tepi Barat dan pengepungan kejam terhadap Jalur Gaza (Novi Thusyifa dan Nur Asia 2024).

Dari beberapa penelitian yang telah disajikan, sebagian besar membahas terkait gerakan sosial itu sendiri dalam melawan Israel terhadap kekejaman yang telah mereka lakukan kepada Palestina. Mulai dari gerakan boikot yaitu BDS, gerakan Syeikh Ahmad Yasin, dan juga terkait kekuatan media sosial terkait gerakan *#AllEyesOnRaffah*, semuanya bergerak menggunakan kekuatan non-kekerasan. Namun, belum ditemukan sebuah penelitian yang membahas terkait gerakan sosial *Standing Together* dalam melawan kekejaman dan juga pendudukan ilegal yang dilakukan Israel di Palestina. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini akan fokus membahas terkait salah satu gerakan sosial yaitu *Standing Together* dalam melawan pendudukan Israel di Palestina dengan menggunakan perspektif non-kekerasan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sebuah teori yang berasal dari Gene Sharp, yang berjudul *How Nonviolent Struggle Works* (Gene Sharp 2015). Dimana pada teori ini dijelaskan bahwasanya aksi non kekerasan merujuk pada berbagai bentuk metode protes, non-kooperasi, dan intervensi yang dilakukan oleh para penentang untuk menolak sebuah tindakan tertentu tanpa melibatkan sebuah kekerasan fisik. Aksi non kekerasan ini bukanlah sebuah

bentuk tindakan yang bersifat pasif atau diam, melainkan ia merupakan sebuah bentuk aksi yang aktif, dan tidak mengandalkan bentuk kekerasan fisik di dalamnya. Aksi non-kekerasan bukanlah sebuah cara untuk menghindari atau mengabaikan suatu konflik, melainkan sebuah pendekatan untuk bertindak secara efektif dalam politik, khususnya dalam konflik yang menggunakan sebuah kekuasaan. Isu yang dipertaruhkan biasanya bervariasi, seperti isu yang berkaitan dengan politik antara kelompok-kelompok atau dengan pemerintah, atau bahkan dalam beberapa kasus antara pemerintah dan pihak yang menentang seperti dalam situasi embargo atau pendudukan (Gene Sharp 2015).

Perlu diketahui bersama bahwasanya, berbagai teknik khusus dalam aksi non-kekerasan, dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu :

- a) Protes dan Persuasi. Dimana protes dan persuasi ini adalah bentuk perlawanan yang mencakup berbagai cara, biasanya berupa tindakan simbolis untuk menunjukkan penolakan atau dukungan terhadap suatu hal. Aksi-aksi ini lebih dari sekedar berbicara, tapi belum sampai kepada tahap menolak kerja sama atau melakukan aksi langsung. Aksi seperti ini bisa ditujukan kepada pihak lawan, masyarakat umum, kelompok yang merasa dirugikan, atau ketiganya sekaligus dengan harapan dapat mempengaruhi mereka. Selain daripada itu juga, tujuan utama dari aksi ini adalah agar pihak yang dituju mau berubah, entah itu memperbaiki sesuatu, menghentikan tindakan tertentu, atau memenuhi tuntutan kelompok yang protes. Dalam kategori protes dan persuasi ini, terdapat 54 cara protes damai yang telah dicatat, dan semuanya dibagi dalam 10 sub-kategori, diantaranya adalah pernyataan formal, komunikasi dengan khalayak luas, presentasi kelompok, tindakan simbolik di ruang publik, tekanan terhadap individu, drama dan musik, aksi arak-arakan,

penghormatan kepada yang telah wafat, perkumpulan publik, dan penarikan diri serta penolakan (Gene Sharp 2015).

b) Non-kooperasi. Dimana non-kooperasi politik sendiri dapat digunakan sebagai bentuk protes, untuk menghentikan operasional suatu unit politik, atau untuk mendukung perpecahan dalam pemerintahan. Dimana, pada kategori ini, kelompok non-kekerasan menarik diri bahkan menahan diri untuk tidak melakukan kerjasama sosial, ekonomi maupun politik.

- Dalam teori Gene Sharp (Gene Sharp 2015), non-kooperasi sosial meliputi 15 metode yang terbagi menjadi 3 kelompok kecil, yakni : Pengucilan terhadap individu, Penolakan terhadap acara, kebiasaan, dan lembaga sosial, dan menjauh dari sistem sosial.
- Non-kooperasi ekonomi (Boikot ekonomi) adalah sebuah tindakan menolak untuk membeli, menjual, menangani, atau mendistribusikan barang dan jasa tertentu. Dalam non-kooperasi ekonomi ini, terdapat 25 metode yang dibagi menjadi 6 subkelompok, yakni : Aksi oleh konsumen, Aksi oleh pekerja dan produsen, Aksi oleh perantara (Distributor/Supplier), Aksi oleh pemilik dan pihak manajemen, Aksi oleh pemegang sumber daya keuangan, dan Aksi oleh pemerintah (Gene Sharp 2015).
- Non-kooperasi politik dapat dilakukan untuk menyatakan protes, menghentikan berfungsinya unit politik, atau berkontribusi pada pembubaran pemerintahan. Non-kooperasi politik ini mencakup 38 metode yang dibagi menjadi 6 subkelompok, diantaranya adalah: Penolakan terhadap otoritas, Nonkooperasi warga dan pemerintah, Alternatif warga terhadap kebijakan, Aksi oleh personel pemerintah,

Tindakan pemerintah dalam negeri, dan Tindakan pemerintah Internasional (Gene Sharp 2015).

- c. Intervensi non-kekerasan. Metode-metode intervensi non-kekerasan adalah sebuah tindakan-tindakan yang secara langsung berusaha untuk mengubah situasi yang ada. Intervensi negatif dapat mengganggu dan bahkan meruntuhkan pola perilaku, kebijakan, hubungan, atau institusi yang sudah ada, sementara intervensi positif berusaha membentuk pola perilaku, kebijakan, hubungan, atau institusi baru yang lebih adil. Metode-metode intervensi non-kekerasan menghadapi tantangan yang lebih langsung dan mendesak. Metode-metode ini sering kali lebih sulit untuk dipertahankan dalam jangka panjang dan bisa berisiko memicu penindasan yang lebih *intens*. Intervensi ini dapat digunakan secara defensif, untuk melindungi pola perilaku, institusi, inisiatif independen, atau secara ofensif untuk mengarahkan perjuangan para aktivis menuju pihak lawan, bahkan tanpa adanya provokasi secara langsung (Gene Sharp 2015).

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan teori Gene Sharp, dikatakan bahwasanya aksi non-kekerasan bukanlah sebuah gerakan atau tindakan yang bersifat pasif, dan menghindari bentuk tindakan kekerasan di dalam aksinya. Dalam hal ini, salah satu gerakan aksi non-kekerasan yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan perdamaian dan keadilan sosial di wilayah yang terlibat dalam konflik, khususnya antara Israel dan Palestina adalah sebuah gerakan *Standing Together*. Gerakan ini bukanlah sebuah partai politik atau bahkan organisasi non-pemerintah, melainkan sebuah gerakan aktivis yang berakar pada komunitas yang mengorganisir warga Yahudi dan Palestina di

Israel untuk menentang pendudukan serta memperjuangkan perdamaian, kesetaraan, dan keadilan sosial. Dimana dalam pengaplikasiannya, *Standing Together* adalah sebuah gerakan non-kekerasan yang menggunakan aksi simbolik yaitu demonstrasi, seperti pawai, parade, dan lain-lain untuk menyuarakan terkait ketidaksetujuannya terhadap pendudukan Israel di Palestina, seperti melakukan aksi kampanye publik untuk mempengaruhi wacana, kampanye dalam rangka mengumpulkan bantuan untuk Gaza, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, minimnya aksi vigil yang dilakukan oleh *Standing Together* menunjukkan bahwa strategi gerakan *Standing Together* masih lebih bertumpu pada bentuk-bentuk protes aktif dan massal ketimbang aksi diam yang bersifat simbolik dan khidmat. Selanjutnya, *Standing Together* juga melakukan aksi protes terhadap pemerintah Netanyahu yang tidak ingin melakukan perdamaian kepada pihak Palestina. Hal ini menunjukkan bahwasanya non-kooperasi yang relevan dengan aksi yang dilakukan oleh *Standing Together* tersebut adalah non-kooperasi politik. Dan yang terakhir, *Standing Together* melakukan tur dan webinar untuk menyuarakan terkait hal-hal yang perlu menjadi sorotan publik. Yang mana, intervensi non-kekerasan yang dilakukan oleh *Standing Together* tergolong sebagai intervensi non kekerasan tipe positif. Sehingga, dapat disimpulkan bahwasanya aksi simbolik, bentuk protes, dan intervensi yang dilakukan oleh *Standing Together* ini tergolong ke dalam teknik khusus aksi non-kekerasan yang menggunakan 3 kategori yang terdapat pada teori Gene Sharp, yakni meliputi kategori protes dan persuasi, non-kooperasi dalam hal memboikot bagian politik, dan intervensi non-kekerasan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Studi ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yang mengaplikasikan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui sumber-sumber seperti artikel, jurnal, dan buku. Metode penelitian ini cukup relevan bagi penulis dalam menganalisis terkait permasalahan pendudukan Israel di Palestina melalui gerakan *Standing Together*.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu gerakan *standing together* dalam melawan pendudukan Israel di Palestina, dengan objek penelitian yaitu, peran *standing together* terhadap permasalahan pendudukan Israel di Palestina.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data. Hal ini dilakukan dengan membaca berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel, jurnal dan materi relevan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian, untuk memperoleh data yang akurat dan shahih.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka untuk mencari dan mengumpulkan sebuah informasi dan data yang diperlukan. Penelitian ini juga melibatkan pembacaan dan

analisis data yang dianggap relevan, baik berupa data sekunder seperti statistik, jurnal, maupun dokumentasi lainnya.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada Bab I, penulis menjelaskan terkait latar belakang permasalahan secara umum yang berhubungan dengan konflik antara Israel dan Palestina, serta gerakan aktivis non-kekerasan yang terlibat di dalamnya. Termasuk poin rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Di Bab II, menjelaskan secara terperinci terkait kekerasan yang dilakukan oleh Israel kepada warga Palestina, serta dinamika gerakan sosial dan organisasi Pro-Palestina yang berada di Israel.

Bab III, membahas terkait profil gerakan *Standing Together* dalam melawan pendudukan Israel di Palestina, menjelaskan bentuk aksi non kekerasan yang dilakukan, serta membahas terkait tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh gerakan *Standing Together*.

Bab IV, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KONFLIK YANG TERJADI ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA SELAMA TAHUN 2020-2024

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya konflik antara Israel dan Palestina ini bukanlah suatu permasalahan yang baru. Melainkan, konflik antara keduanya telah lama terjadi, namun hingga saat ini belum menemukan titik terang mengenai perdamaian dan penyelesaian sengketa antara keduanya. Pada bab ini, akan membahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi antara Israel dan Palestina, dengan fokus terhadap kekerasan atau pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel, dan kesengsaraan yang dihadapi oleh rakyat Palestina itu sendiri, serta membahas terkait perkembangan gerakan sosial dan organisasi pro-Palestina yang berada di Israel, yang memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan, menciptakan perdamaian, memperjuangkan hak-hak warga Palestina yang telah ditindas oleh para pasukan Israel, menciptakan keamanan yang bersifat jangka panjang untuk warga negara Israel itu sendiri, serta mengembalikan Israel menjadi sebuah negara yang demokratis.

2.1 Kekerasan Yang Dilakukan oleh Israel Terhadap Warga Palestina

Hukum pidana internasional mengatur terkait kejahatan-kejahatan internasional yang terjadi. Dimana, hukum pidana internasional memiliki sumber utama yakni Statuta Roma. Dalam statuta Roma ini disebutkan bahwa yang menjadi jenis tindak pidana internasional adalah genosida (*The Crime of Genocide*), kejahatan manusia (*Crimes Against Humanity*), kejahatan perang (*War Crimes*), dan kejahatan agresi (*The Crime of Aggression*). Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* atau ICC) adalah pengadilan tetap dan independen pertama yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan

pelanggaran terberat terhadap hukum kemanusiaan internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan dan tindakan agresi. Dengan mengetahui prinsip-prinsip dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dan prinsip yang terkandung dalam piagam PBB, jelas bahwa agresi yang dilakukan oleh Israel telah melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter (Marpaung dkk. 2024).

a. Kejahatan Genosida (*The Crime of Genocide*)

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh *Amnesty Internasional*, menunjukkan bahwasanya Israel telah melakukan tindakan-tindakan yang dilarang berdasarkan Konvensi Genosida, dengan tujuan khusus untuk menghancurkan warga Palestina di Gaza. Kejahatan genosida tersebut meliputi pembunuhan, menyebabkan cedera fisik atau mental yang cukup serius, dan dengan sengaja memberikan kondisi kehidupan yang dapat mengakibatkan kehancuran fisik pada warga Palestina di Gaza. Selain daripada itu juga, *Amnesty Internasional* mengatakan bahwasanya selama berbulan-bulan, Israel terus-menerus melakukan tindakan yang mengarah pada kejahatan genosida, meskipun mereka tahu bahwasanya hal tersebut menyebabkan sebuah penderitaan yang besar dan kerugian yang tidak bisa digantikan bagi warga Palestina di Gaza. Israel tetap melanjutkan tindakannya, meskipun sudah berulang kali diperingatkan tentang krisis kemanusiaan parah yang terjadi di Palestina, dan bahkan ICJ pun telah memerintahkannya untuk segera membuka akses bantuan bagi warga sipil. Namun, menurut Israel niat untuk melakukan genosida bisa saja terjadi bersamaan dengan tujuan militer, dan tidak harus menjadi satu-satunya sebuah tujuan Israel (*Amnesty International* 2024).

b. Kejahatan Manusia (*Crimes Against Humanity*)

Dikutip pada laman resmi UNHRC, disebutkan bahwasanya Israel telah melakukan kebijakan sistematis untuk menghancurkan sistem layanan kesehatan di Gaza sebagai bagian dari serangan yang lebih luas terhadap wilayah Palestina itu sendiri, dan dengan sengaja terus-menerus menyerang tenaga medis serta fasilitas kesehatan. Dengan menyerang fasilitas kesehatan, dapat dikatakan bahwasanya Israel secara langsung menyerang hak atas kesehatan warga Palestina yang memiliki dampak jangka panjang dan serius terhadap warga sipil Palestina itu sendiri. Pada laman resmi UNHRC ini juga disebutkan bahwasanya pasukan keamanan Israel secara sengaja membunuh, menahan, dan menyiksa tenaga medis, serta menyerang kendaraan medis, sambil memperketat pengepungan terhadap Gaza dan membatasi izin keluar wilayah untuk perawatan medis (UNHRC 2024).

c. Kejahatan Perang (*War Crimes*)

Masih dengan referensi yang sama yakni UNHRC, mengatakan bahwasanya Dalam salah satu peristiwa paling tragis, Komisi meneliti kasus terbunuhnya Hind Rajab, seorang anak berusia lima tahun, bersama keluarganya. Selain itu, ambulans milik Palang Merah Palestina yang dikirim untuk menyelamatkan Hind juga ditembaki, dan dua paramedis di dalamnya tewas. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Divisi 162 dari Tentara Israel berada di lokasi saat kejadian dan dianggap bertanggung jawab atas kematian keluarga tersebut, penembakan ambulans, serta terbunuhnya para paramedis. Peristiwa ini dianggap sebagai kejahatan perang karena melibatkan pembunuhan yang disengaja dan serangan terhadap fasilitas sipil (UNHRC 2024).

d. Kejahatan Agresi (*The Crime of Aggression*)

Dalam artikel *Law for Palestine*, disebutkan bahwasanya yang menjadi bentuk Kejahatan Agresi yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina adalah tindakan Israel yang terus melakukan aneksasi wilayah Palestina, mengklaim kontrol permanen, dan menghalangi hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina (IhsanAdel 2024).

Israel dan Palestina adalah 2 negara yang akan selalu menjadi sorotan publik. Semakin hari, konflik antara keduanya semakin sengit dan menjadi sebuah konflik yang paling berdarah terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dimana, serangan yang dilakukan oleh Israel telah banyak merusak, menghancurkan fasilitas dan infrastruktur, serta menghilangkan banyak nyawa rakyat Palestina. Mulai dari tempat tinggal warga Palestina, tempat ibadah, rumah sakit, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan pokok lainnya yang sangat terbatas, bahkan kantor PBB yang berada di Palestina, yang digunakan untuk lembaga bantuan ikut dihancurkan oleh Israel (Lewiandy dan Alessandro Christian Max 2024). Sejak 7 Oktober 2023 ketika Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya melancarkan serangan mematikan ke Israel, pasukan Israel membalas dengan hal yang serupa. Dimana, pasukan Israel melancarkan pemboman tanpa henti dari udara, darat maupun laut, serta memberlakukan pengepungan total di wilayah Gaza. Sejak Oktober 2023 lebih dari 44.000 warga Palestina telah terbunuh, sekitar 70% diantaranya adalah wanita dan juga anak-anak. Diperkirakan 10.000 orang lainnya kemungkinan hilang atau bahkan terkubur di bawah reruntuhan bangunan yang hancur. Tidak hanya itu, lebih dari 70% pula infrastruktur sipil yang berada di Jalur Gaza telah dihancurkan. Pengepungan yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza, telah mengakibatkan krisis kemanusiaan yang sangat mengerikan. Dalam hal ini, permasalahan seperti kekurangan air, makanan, dan obat-obatan

dapat mengancam kelangsungan hidup 2,3 juta warga Palestina. Dimana, pasokan listrik yang berada di Gaza juga telah dilumpuhkan, sehingga mengakibatkan pemadaman listrik yang berkelanjutan dan mengakibatkan runtuhnya rumah sakit serta layanan air dan juga sanitasi (GCR2P 2024).

Dikutip dari jurnal yang berjudul pelanggaran HAM terhadap warga sipil di Palestina: Tinjauan hukum internasional dan upaya penyelesaian, terdapat beberapa jenis pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina, yaitu (Iklima Nur Sya`bani dkk. 2024) :

- a. Hak untuk hidup dan keselamatan. Dimana, warga sipil Palestina seringkali menjadi korban dalam konflik bersenjata antara Israel dan kelompok-kelompok militan Palestina. Adanya serangan udara dan tembakan artileri yang diluncurkan oleh Israel sering menyebabkan kematian serta membuat cedera pada warga sipil, termasuk anak-anak dan juga perempuan.
- b. Hak atas pergerakan. Dalam hal ini, pembatasan pergerakan melalui pos pemeriksaan, tembok pemisah, dan pembatasan akses jalan sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga Palestina. Dimana, mereka kesulitan untuk mengakses pekerjaan, layanan kesehatan, tempat ibadah, bahkan pendidikan sekalipun.
- c. Hak atas kepemilikan dan tempat tinggal. Rumah warga Palestina yang berada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sering dibongkar dengan paksa dan dengan alasan tidak memiliki izin bangunan yang sah. Pemukiman ilegal yang dilakukan oleh Israel di wilayah-wilayah ini juga seringkali menyebabkan pengusiran warga Palestina dari tanah mereka sendiri secara tidak terhormat.
- d. Hak atas pendidikan. Sekolah dan beberapa institusi pendidikan yang berada di Palestina ikut menjadi sasaran dari kejahatan Israel. Sehingga siswa dan guru tidak dapat

melakukan kegiatan belajar mengajar dikarenakan konflik Israel dan Palestina yang tak kunjung usai.

- e. Hak atas kesehatan. Pembatasan pergerakan dan blokade di wilayah Gaza membuat akses terhadap layanan kesehatan menjadi sangat sukar. Dimana, rumah sakit yang berada di Palestina sering kekurangan obat-obatan, peralatan medis, dan tenaga medis yang memadai akibat kejahatan Israel yang membatasi segala bentuk bantuan masuk ke wilayah Palestina.
- f. Hak atas standar hidup yang layak. Blokade yang terjadi di Gaza menyebabkan kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan. Termasuk kekurangan air bersih, listrik yang memadai, dan infrastruktur dasar lainnya. Tingkat kemiskinan dan pengangguran pun melonjak tinggi, dan banyak keluarga yang hidup dengan sebuah kondisi yang tidak layak.
- g. Hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul. Aktivis, jurnalis, dan individu yang berbicara terkait penentangan pendudukan atau kebijakan yang telah dibuat oleh Israel seringkali menghadapi intimidasi, penahanan, dan juga kekerasan. Demonstrasi dan protes juga sering dibubarkan dengan menggunakan kekerasan.
- h. Hak atas pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan permasalahan blokade dan pembatasan lainnya membuat perkembangan ekonomi di wilayah Palestina menjadi terhambat. Selain itu juga kegiatan impor dan ekspor barang membatasi peluang bisnis dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di Palestina. (Iklima Nur Sya`bani dkk. 2024).

Selain permasalahan pelanggaran HAM, dan penyerangan militer yang dilakukan oleh Israel, mereka juga telah melanggar keamanan manusia masyarakat Palestina seperti aneksasi wilayah di Tepi Barat. Aneksasi yang dilakukan oleh Israel terhadap wilayah Palestina terjadi sejak tahun

1972. Salah satu wilayah dengan terjadinya aneksasi dari Israel adalah Sheikh Jarrah yang berada di wilayah Tepi Barat. Pendudukan tersebut menjadikan Israel lebih mudah untuk mencaplok wilayah Palestina, karena Israel telah menjadi aktor yang menguasai wilayah tersebut (Nugraha dkk. 2024).

Selain permasalahan dan pelanggaran yang telah disebutkan diatas, dalam agresinya ke Palestina, Israel menggunakan senjata-senjata yang dilarang penggunaannya oleh beberapa instrumen hukum internasional, salah satunya adalah penggunaan bom berbahan fosfor. Dikutip dari HRW (*Human Rights Watch*), menyebutkan bahwa Israel menggunakan bom fosfor dalam melakukan penyerangan ke kawasan pelabuhan Gaza pada tanggal 11 Oktober 2023. Dilaporkan juga bahwa banyak anak-anak dan lansia yang mengalami sesak nafas karena udara telah dipenuhi dengan asap. Senjata sejenis juga telah dilaporkan digunakan oleh Israel di Lebanon Selatan pada tanggal 10 Oktober 2023. Selain daripada itu, dikatakan juga bahwasanya fosfor putih, yang dapat digunakan untuk membuat asap atau sebagai senjata, berisiko besar bagi warga sipil karena dapat menyebabkan luka bakar yang cukup parah dan memiliki efek jangka panjang bagi korban yang selamat. Penggunaannya di daerah padat penduduk seperti Gaza bertentangan dengan hukum humaniter internasional, yang mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna melindungi nyawa dan mencegah cedera pada warga sipil. Penggunaan fosfor putih ini juga menunjukkan pentingnya untuk mengevaluasi kembali status dan keefektifan Protokol III Konvensi Senjata Konvensional (CCW), yang saat ini merupakan satu-satunya peraturan internasional yang secara khusus mengatur terkait senjata pembakar. Selama operasi *Cast Lead* yang berlangsung dari 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009, militer Israel menembakkan sekitar 200 amunisi fosfor putih yang diluncurkan dari darat ke daerah padat penduduk di Gaza. Pasukan Israel terutama

menggunakan proyektil artileri 155mm M825E1, yang melepaskan irisan fosfor yang terbakar sejauh 125 meter ke segala arah, sehingga menimbulkan dampak yang begitu luas. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan bahwa penggunaan amunisi ini bertujuan hanya untuk menciptakan tabir asap. Namun, terlepas dari tujuan tersebut, *Human Rights Watch* melaporkan bahwa mereka menemukan puluhan korban sipil dalam enam insiden yang mereka dokumentasikan. Selain itu, amunisi fosfor putih ini juga merusak bangunan sipil, termasuk sekolah, pasar, gudang bantuan kemanusiaan, dan rumah sakit (Human Rights Watch 2023).

Dikutip dari website *United Nations*, mengatakan bahwa tanpa takut akan konsekuensi, Israel masih tetap terus mengabaikan gencatan senjata dari Dewan Keamanan PBB dan tetap melanjutkan pengepungan serta pengeboman tanpa henti di wilayah Gaza bagian utara hingga ke selatan, sambil menantang perintah dan juga peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Tidak hanya itu, di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, para pasukan pendudukan dan kelompok pemukiman Israel masih terus menyerang warga sipil Palestina dalam serangan hariannya terhadap desa-desa, dan juga kota-kota, sehingga menciptakan teror di kalangan penduduk Palestina. Pemukim yang radikal dan kejam terus memprovokasi, menghasut bahkan melakukan serangan di Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif, yang semakin meningkatkan ketegangan agama. Selain daripada itu, pasukan Israel juga telah melakukan pengepungan dan merusak kamp pengungsi Nur Shams di dekat Tulkarem selama hampir 3 hari, dan mengakibatkan 14 warga Palestina tewas, 50 lainnya terluka, merusak rumah-rumah, memaksa setidaknya 11 keluarga untuk mengungsi, dan memutuskan akses air dan listrik untuk 4.000 orang. Tanpa adanya gencatan senjata atau bahkan bentuk perlindungan apapun, Israel akan terus menerus memberikan rasa trauma yang mendalam bagi rakyat Palestina. Warga sipil yang ketakutan di Gaza, sebagian besar adalah tunawisma dan hidup dalam kekurangan dan kesusahan

yang ekstrem di tempat penampungan dan tenda-tenda *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) menjadi saksi bisu tentang kejahatan para pasukan Israel. Mulai dari pembantaian, eksekusi, penyiksaan, penahanan, serta hilangnya orang-orang tercinta mereka. Selain itu juga, mereka mengalami kelaparan sebab Israel menggunakan pasokan makanan sebagai senjata mereka, terancam terkena penyakit dikarenakan kekurangan air dan obat-obatan, serta mengalami cacat akibat kurangnya perawatan medis untuk para korban ledakan bom dan peluru. Mereka hidup dengan penuh ketakutan yang sangat amat mendalam akibat kejahatan yang dilakukan oleh para pasukan Israel (United Nations 2024).

Pada laporan yang disajikan oleh PBB, dikatakan bahwasanya menurut UNICEF setiap 10 menit satu anak di Gaza terbunuh atau bahkan terluka, sebuah kenyataan yang sangat amat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima. Lebih dari 12.000 anak terluka akibat serangan pendudukan Israel, dengan rata-rata sekitar 70 anak perhari yang harus mengalami dan menghadapi kekejaman Israel. Dan diperkirakan 10 dari anak-anak tersebut kehilangan anggota tubuh atau menderita sebuah cedera yang cukup serius dan mengubah kehidupan mereka. Lebih dari 17.000 anak-anak Palestina menjadi yatim piatu atau terpisah dari keluarga mereka (United Nations 2024).

2.2 Perkembangan Organisasi dan Gerakan Sosial Pro-Palestina yang Berada di Israel

2.2.1 Fase awal (1978) Perdamaian Konflik Israel-Palestina

Pada fase awal ini ditandai dengan berdirinya sebuah gerakan Zionis sayap kiri yang berjuang untuk memastikan Israel tetap menjadi sebuah negara Yahudi dan juga demokratis, yaitu gerakan *Peace Now*. Dimana, gerakan ini juga tergolong sebagai gerakan terbesar dan tertua yang berada di wilayah Israel yang memperjuangkan

perdamaian melalui tekanan publik. *Peace Now* percaya bahwa satu-satunya cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mendirikan negara Palestina sesuai dengan perbatasan yang diberlakukan pada tahun 1967 yang akan saling berdampingan dengan negara Israel. Tujuan utama dari adanya gerakan *Peace Now* ini adalah untuk mewakili warga Israel yang mendukung sebuah solusi terhadap kedua negara yang sedang berselisih, serta membawa isu-isu terkait konflik dan penyelesaiannya ke dalam agenda publik, sembari memberikan tekanan kepada para pembuat kebijakan.

Aktivitas gerakan ini meliputi sebuah demonstrasi, ceramah, konferensi, tur pendidikan, kampanye publik, dan distribusi informasi. Selain daripada itu, banyak relawan yang juga ikut terlibat dalam kegiatan tersebut yang membantu keberhasilan *Peace Now* dan meningkatkan pengaruhnya di masyarakat Israel. Bahkan *Peace Now* juga semakin berfokus terhadap dampak dari permasalahan pendudukan dan perluasan pemukiman yang terjadi di wilayah Palestina. Selain kerusakan politik dan ekonomi, ada juga dampak moral serta perubahan pada nilai-nilai dan tatanan sosial akibat penguasaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun terhadap jutaan warga Palestina di Tepi Barat. Oleh sebab itu, selain daripada memperjuangkan perdamaian, *Peace Now* juga berjuang untuk mempertahankan sifat demokratis negara Israel (“Who We Are,” t.t.).

Selanjutnya, pada tahun 1989 *B'Tselem* didirikan sebagai sebuah pusat informasi Hak Asasi Manusia (HAM) Israel yang berada di wilayah pendudukan yang berjuang untuk masa depan. Di mana HAM, kebebasan, dan kesetaraan dijamin untuk semua orang, baik itu Palestina maupun Yahudi yang tinggal di antara Sungai Yordan dan Laut Tengah. Masa depan seperti halnya yang telah disebutkan tadi hanya akan terwujud ketika pendudukan Israel dan sistem apartheid berakhir. Sejak *B'Tselem* berdiri pada

tahun 1989, *B'Tselem* telah mendokumentasikan, meneliti, dan menerbitkan data, kesaksian, video, makalah posisi, dan laporan tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel di Wilayah Pendudukan (“About B’Tselem | B’Tselem,” t.t.). Pada fase ini, ditandai dengan adanya sebuah kesepakatan Camp David antara Mesir dan Israel, serta pengakuan terhadap PLO (*Palestinian Liberation Organization*) sebagai satu-satunya wakil Palestina. Namun sayangnya, kesepakatan Camp David ini tidak berjalan sesuai dengan harapan, atau gagal (Hanafi 2010).

2.2.2 Fase menengah (1993) Perdamaian Konflik Israel-Palestina

Pada fase menengah ini, ditandai dengan adanya sebuah proses perdamaian Oslo yang dimulai pada tahun 1993 dengan memberi Palestina kesempatan untuk ikut terlibat langsung dalam sebuah negosiasi damai dengan Israel, yang berujung pada pengakuan solusi dua negara. Namun, meski sudah ada perjanjian, baik Israel maupun Palestina gagal memenuhi komitmen mereka. Pemukiman Israel terus berkembang, dan serangan-serangan ke Palestina juga terjadi selama proses tersebut. Ketegangan ini semakin meningkat setelah pembunuhan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, pada tahun 1995 dan terpilihnya pemimpin yang lebih keras, Benjamin Netanyahu, pada tahun 1996.

Pada fase ini juga, ditandai dengan berdirinya sebuah organisasi Israel pro-Palestina yaitu *Gush Shalom*. Dimana, *Gush Shalom* ini didirikan pada tahun 1993. sebuah kelompok inti dari gerakan perdamaian Israel. *Gush Shalom* telah memainkan peran penting dalam membentuk agenda moral dan politik gerakan perdamaian di Israel, serta menentang terkait konsensus nasional yang dibangun berdasarkan informasi yang salah. *Gush Shalom* ini merupakan sebuah organisasi ekstra-parlementer, yang berarti

tidak terikat dengan partai politik manapun, meskipun beberapa anggotanya ada yang terlibat dengan sebuah partai politik tertentu, namun *Gush Shalom* tidak mendukung suatu partai politik manapun. Tujuan utama *Gush Shalom* adalah untuk mempengaruhi opini publik Israel agar mendukung perdamaian dan rekonsiliasi dengan rakyat Palestina, berdasarkan prinsip-prinsip, mengakhiri pendudukan, mengaku hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka di wilayah yang diduduki Israel sejak 1967, mengembalikan "Garis Hijau" pra-1967 sebagai perbatasan antara Israel dan Palestina, dengan beberapa perubahan kecil yang disetujui oleh kedua pihak, menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota bersama, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina dan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, mengakui hak pengungsi Palestina untuk memilih antara kompensasi atau kembali ke Palestina dan Israel, dengan kuota tahunan yang disepakati, menjaga keamanan Israel dan Palestina melalui kesepakatan bersama, dan berusaha mencapai perdamaian dengan negara-negara Arab dan membentuk uni regional.

Dalam hal ini, *Gush Shalom* melakukan beberapa aksi dan kampanye untuk mendukung sebuah perdamaian, melalui kampanye pendidikan politik, demonstrasi massal dan aksi langsung di lapangan, serta penerbitan materi seperti stiker dan selebaran untuk meningkatkan kesadaran publik. Selain daripada itu, contoh aksi terbaru yang dilakukan oleh *Gush Shalom* termasuk membantu membangun kembali rumah yang telah dihancurkan, mengisi parit yang dibangun untuk memutus akses ke desa Palestina, dan berpartisipasi dalam panen zaitun untuk warga desa yang dicegah oleh pemukim dan tentara ("About Gush Shalom - Gush Shalom - Israeli Peace Bloc," t.t.).

Selanjutnya, pada tahun 1997 didirikan sebuah organisasi ICAHD (*Israeli Committee Against House Demolitions*), sebuah organisasi yang berkomitmen untuk berperan dalam suatu proses politik untuk mengakhiri pelanggaran hukum internasional yang telah dilakukan oleh Israel. Dulunya, ICAHD hanya berfokus untuk pengakhiran pendudukan yang dilakukan oleh Israel, termasuk melawan penghancuran rumah warga Palestina yang dilakukan oleh Israel yang melanggar Konvensi Jenewa Keempat. Namun seiring berjalannya waktu, ICAHD menyadari bahwasanya penghancuran rumah dan pemindahan secara paksa yang ditimbulkan oleh pasukan Israel merupakan bagian dari pembersihan etnis terhadap populasi Palestina asli. ICAHD menyadari bahwasanya yang terjadi antara Israel dan Palestina bukan hanya sekedar sebuah konflik, karena menurut ICAHD tidak ada dua pihak yang setara. Sehingga, fokus utama ICAHD pada saat itu adalah menyoroti pengakhiran kebijakan apartheid Israel dan tujuan kolonial pemukiman yang dilakukan oleh negara Israel terhadap rakyat Palestina. ICAHD selalu menyerukan penyelesaian yang adil terhadap masalah yang terjadi antara Israel dan Palestina.

Sebelumnya, ICAHD mendukung solusi dua negara, namun seiring berjalannya waktu dan pemahaman yang semakin berkembang mengenai Matriks Kontrol Israel terhadap Palestina, ICAHD menyadari bahwa satu-satunya cara yang adil untuk menyelesaikan sengketa antara keduanya, adalah dengan menciptakan satu negara demokratis di seluruh Palestina historis. ICAHD juga mendukung mobilisasi rakyat Palestina yang menyerukan pembentukan satu negara, dan sebagai orang Yahudi kritis, ICAHD siap berdiri bersama rakyat Palestina (ICAHD, t.t.).

2.2.3 Fase kontemporer (2000-sekarang) Perdamaian Konflik Israel-Palestina

Dimana pada fase ini ditandai dengan proses perdamaian Oslo di tahun sebelumnya runtuh dengan meletusnya intifada kedua pada tahun 2001, yang semakin memperburuk keadaan (Hanafi 2010). Pada fase ini, ditandai dengan berdirinya sebuah gerakan *Zochrot* yang didirikan pada tahun 2002. Dimana, *Zochrot* mengibaratkan sebuah kesengsaraan yang dialami oleh para rakyat Palestina dalam bahasa arab, yaitu (النكبة), yang artinya adalah bencana besar. Hal ini merujuk pada sebuah proses penghilangan hak-hak rakyat Palestina atas tanah dan properti mereka yang masih berlangsung hingga sekarang. Proses ini dimulai jauh sebelum 1948, dengan ambisi Zionis untuk mengubah sebanyak mungkin tanah Palestina menjadi milik eksklusif Yahudi. Perang 1948 adalah titik puncaknya: selain kekejaman perang, pembantaian, pemerkosaan, dan perampokan, Nakba juga melibatkan penghancuran lebih dari 600 pemukiman dan membuat lebih dari 750.000 orang Palestina menjadi pengungsi, yang mencakup sekitar 85 persen penduduk Palestina di wilayah yang sekarang menjadi Israel.

Dalam hal ini, *Zochrot* dan organisasi dan gerakan sosial yang lain telah berhasil menyebarkan terkait sebuah pemahaman tentang ‘Nakba’ kepada masyarakat Yahudi di Israel. Namun, pemahaman tentang Nakba dalam diskusi publik Israel belum diakui dengan pengakuan dan penerimaan tanggung jawab yang luas, atau pemahaman tentang proses berkelanjutan penghilangan hak rakyat Palestina. *Zochrot* berpendapat bahwa perdamaian hanya bisa tercapai jika tanah ini di dekolonisasi dan jika semua penduduk dan pengungsi bisa hidup di sini tanpa takut diusir, ditindas, atau tidak bisa kembali. *Zochrot* menganggap kembalinya pengungsi Palestina dan kehidupan bersama sebagai

bagian penting dari pembentukan masyarakat yang adil dan setara, dimana semua orang bisa hidup bersama dengan aman dan damai sebagai pemulihan yang tepat untuk Nakba. *Zochrot* melihat kembalinya pengungsi sebagai sebuah proses jangka panjang yang melibatkan lebih dari sekadar kembalinya pengungsi ke tanah mereka, tetapi juga perubahan mendalam dalam masyarakat itu sendiri.

Proses ini bertujuan untuk memberikan kehidupan yang penuh martabat dan kebebasan bagi setiap pengungsi dan penghuni dalam kerangka yang setara dan bersama. Kembalinya pengungsi adalah inti dari perubahan ini, dan proses ini akan dipimpin oleh para pengungsi sendiri. Dalam pengertian ini, kembalinya pengungsi akan dimulai jauh sebelum mereka kembali dan akan berlanjut setelah itu. Dalam melakukan aksinya, *Zochrot* menyediakan informasi tentang Nakba Palestina dan Hak Kembali, terutama untuk publik Yahudi di Israel. Hal ini dilakukan melalui tur yang dipandu ke situs-situs Palestina yang telah dihancurkan dan dikosongkan selama Nakba, serta melalui kursus, lokakarya, aksi langsung, kampanye publik, acara, dan melalui database trilingual (*Zochrot*, t.t.). Selanjutnya, pada tahun 2004 didirikan sebuah organisasi Israel pro-Palestina yang bernama *Breaking the Silence*, yang merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari veteran tentara Israel yang telah selesai bertugas sejak dimulainya Intifada Kedua, dengan komitmen untuk mengungkapkan kenyataan kehidupan sehari-hari mereka di wilayah pendudukan kepada publik. *Breaking the Silence* memiliki tujuan untuk memicu perdebatan publik mengenai konsekuensi dari sebuah kenyataan di mana tentara muda setiap hari berhadapan dengan warga sipil dan mengendalikan kehidupan mereka. Selain itu, *Breaking the Silence* juga berusaha untuk mengakhiri pendudukan yang dilakukan oleh pasukan Israel di wilayah Palestina.

Tentara yang bertugas di wilayah pendudukan seringkali menyaksikan dan juga terlibat dalam tindakan militer yang sangat berdampak pada mereka. Kasus penyalahgunaan terhadap warga Palestina, perampokan, dan penghancuran properti sudah menjadi hal yang biasa, meskipun hal tersebut sering dianggap sebagai kejadian ekstrem oleh pihak berwenang. Kesaksian para veteran tentara menggambarkan kenyataan yang lebih gelap, di mana penurunan moral terlihat dalam perintah militer dan aturan keterlibatan yang sah demi alasan keamanan Israel. Meskipun tentara dan komandan Israel mengetahui kenyataan ini, masyarakat Israel umumnya mengabaikan dan menyangkal tindakan yang dilakukan atas nama rakyat Israel. Tentara yang kembali ke kehidupan sipil sering kali merasa terkejut dengan perbedaan besar antara kenyataan yang mereka alami di wilayah pendudukan dan ketidakpedulian terhadap hal tersebut di rumah. Untuk melanjutkan kehidupan sipil, mereka harus melupakan apa yang telah mereka saksikan dan lakukan.

Breaking the Silence berusaha memberi suara kepada tentara lain dan mendorong masyarakat Israel untuk menghadapi kenyataan yang diciptakan oleh tentara-tentara Israel. Organisasi ini juga mengumpulkan dan menerbitkan kesaksian dari veteran yang bertugas di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur sejak tahun 2000. Untuk meningkatkan kesadaran publik, *Breaking the Silence* mengadakan ceramah, pertemuan di rumah, dan acara publik lainnya yang membahas kenyataan di wilayah pendudukan melalui cerita mantan tentara. Mereka juga mengadakan tur di Hebron dan Bukit Hebron Selatan di Tepi Barat untuk memberi kesempatan kepada publik melihat kenyataan yang hanya beberapa menit dari rumah mereka, tetapi jarang digambarkan di media (“*Breaking the Silence* › *The Organization*,” t.t.).

Selama Perang Gaza di tahun 2014, terbentuk dua organisasi perdamaian Israel dan Palestina, yaitu *Combatants for Peace* (CFP) dan *Parents Circle/Families Forum* (PCFF). Dimana, kedua organisasi ini berbeda dengan organisasi dan gerakan sosial lainnya yang berada di wilayah Israel dan Palestina, dikarenakan mereka mendefinisikan diri mereka sebagai sebuah gerakan binasional Israel-Palestina. PCFF terdiri dari orang Palestina dan Israel yang telah kehilangan anggota keluarga dekat (seperti anak atau orang tua) dalam konflik. Mereka bertemu untuk menunjukkan bahwa rekonsiliasi mungkin dilakukan dan memberi tekanan pada Pemerintah Israel serta Otoritas Palestina agar terlibat dalam negosiasi untuk memastikan hak asasi manusia, pendirian dua negara untuk dua bangsa, dan penandatanganan perjanjian perdamaian. PCFF didirikan pada 1996 sebagai organisasi perdamaian Israel, namun sejak 2004, organisasi ini melibatkan orang Palestina sebagai anggota setara.

Sejak saat itu, PCFF memiliki struktur organisasi semi-simetris dengan dua Manajer Umum (satu Israel dan satu Palestina). CFP didirikan pada 2006 oleh mantan tentara Israel dan orang Palestina yang sebelumnya terlibat dalam perjuangan kekerasan untuk pembebasan Palestina. CFP menggunakan protes non-kekerasan untuk mendidik tentang rekonsiliasi dan perjuangan tanpa kekerasan, serta menciptakan tekanan politik pada kedua Pemerintah untuk menghentikan kekerasan, mengakhiri pendudukan, dan melanjutkan dialog konstruktif (Gawerc 2017).

Kemudian, pada tahun 2015 terbentuklah sebuah gerakan sosial pro-Palestina yang berada di Israel yaitu gerakan sosial *Standing Together*. Dimana, *Standing Together* ini adalah sebuah gerakan akar rumput yang mengorganisir warga Yahudi dan Palestina

yang berada di wilayah Israel, untuk sama-sama melakukan sebuah aksi terkait penentangan terhadap pendudukan ilegal serta kejahatan yang dilakukan oleh para pasukan Israel kepada rakyat Palestina. Dalam melakukan aksinya, *Standing Together* ini menggunakan kekuatan non-kekerasan dalam melawan dan juga menentang Israel (VORTRAG 2024).

Dalam hal ini, seluruh organisasi dan gerakan sosial pro-Palestina yang telah dijelaskan diatas, semua memiliki upaya dan juga tujuan yang sama, yakni untuk melawan pendudukan ilegal serta kejahatan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina, yang membuat keamanan di wilayah mereka menjadi terganggu. Selain itu juga, tujuan lain dari beberapa organisasi dan gerakan sosial yang ada ini berusaha untuk mendamaikan dan menjadikan konflik antara keduanya ini selalu menjadi perhatian publik agar penyelesaiannya dapat segera dilaksanakan. Namun, perlu diketahui bersama, bahwasanya organisasi dan gerakan sosial yang ada ini memerlukan sebuah identitas kolektif. Dimana, identitas kolektif ini melibatkan sebuah pencapaian yang telah diraih serta mencakup pemahaman bersama mengenai tujuan, strategi, dan lingkungan tempat organisasi dan gerakan sosial ini beroperasi. Menurut Melucci dan Featherstone, mereka menekankan bahwa rasa solidaritas ini dapat terbentuk melalui sebuah interaksi dan juga negosiasi yang terus menerus dilakukan secara berkala. Dalam hal ini diperlukan adanya sebuah keterlibatan emosional dari para aktivis, yang memungkinkan mereka dapat menjadi bagian dari suatu entitas kolektif (Gawerc 2017).

Meskipun demikian, alasan mengapa *Standing Together* menjadi penting untuk digunakan sebagai fokus utama gerakan sosial pada penelitian ini, dikarenakan *Standing Together* melakukan beberapa aksi yang tidak dilakukan oleh gerakan sosial lainnya. Dimana, *Standing*

Together melakukan aksi Patroli “*Solidarity Watch*” yang berfungsi untuk mendampingi orang yang takut keluar rumah, menggabungkan bantuan kemanusiaan dan saling membantu, menyediakan ruang dialog aman melalui pertemuan tatap muka dan virtual, serta memantau dan melaporkan ajakan kekerasan, diskriminasi, dan berita palsu di media. Selain itu, patroli ini juga menekan pihak berwenang, termasuk polisi dan media, untuk menangani kasus kekerasan antar kelompok, mempromosikan pesan solidaritas, serta melatih orang untuk mengurangi ketegangan dalam percakapan yang berpotensi memicu konflik. Selain itu juga, *Standing Together* melakukan aksi *humanitarian guard* dimana *Standing Together* membawa para aktivis ke pos pemeriksaan Tarqumiyah untuk menjaga truk bantuan yang akan menuju Gaza dari serangan pemukim ekstremis yang datang untuk menyerang truk-truk tersebut (Standing Together, t.t.-b). Tidak hanya itu, *Standing Together* juga berupaya untuk membangun hubungan yang baik dengan sekutu terbesar Israel yakni Amerika Serikat untuk menyuarakan terkait perdamaian yang seharusnya terjadi antara kedua belah pihak yaitu Israel dan Palestina, bukan hanya untuk salah satu pihak saja (Samuel Gelinas 2024).

2.3 Profil *Standing Together* Sebagai Gerakan Sosial Pro-Palestina

Gerakan *Omdim B'Yachad (Standing Together)* dimulai pada musim gugur tahun 2015, ketika sejumlah aktivis berkumpul untuk merespons kekerasan yang meningkat antara warga Israel dan Palestina menjelang Hari Raya Yahudi. Pada tahun 2011, sebagian besar aktivis yang terlibat dalam gerakan protes sosial (dikenal sebagai “*tents protest*”), sebuah rangkaian demonstrasi yang melibatkan ratusan ribu orang Israel yang turun ke jalan untuk memprotes biaya hidup yang tinggi. Protes ini sangat menyentuh dan menangani masalah yang nyata dan mendesak: kemiskinan yang dialami banyak orang dan ketidakmampuan anak muda untuk

membeli rumah di kota-kota seperti Tel Aviv. Mereka mengajak teman dan tetangga untuk bergabung, tidur di tenda, dan menuntut keadilan sosial. Pada saat itu, sepertinya masalah tersebut akan mulai mendapat perhatian. Namun, meskipun protes 2011 berhasil membangkitkan kesadaran politik dan semangat anak muda, protes ini mulai meredup dalam beberapa bulan dan tidak banyak membawa perubahan. Terhadap pemerintahan Netanyahu yang lebih memilih mempertahankan status quo, protes ini kurang memiliki pengorganisasian yang terstruktur. Akibatnya, protes tersebut gagal menciptakan kekuatan yang cukup untuk memberikan tekanan berkelanjutan pada pemerintah untuk menemukan solusi (Noa Fleischacke 2020).

Oleh karena itu, pada tahun 2015 kelompok aktivis ini membentuk sebuah gerakan yang tidak hanya mengajak orang turun ke jalan, tetapi juga menyediakan visi, struktur, dan strategi untuk mempertahankan serta mengembangkan gerakan ini. Mereka membentuk cabang-cabang untuk aktivitas berkelanjutan dan menciptakan narasi yang fokus pada pembangunan kekuatan jangka panjang. Tujuan mereka adalah menciptakan gerakan akar rumput yang kuat, yang dibangun atas dasar kemitraan antara orang Yahudi dan Arab yang bersatu untuk berjuang demi perubahan. Inilah yang menjadi cikal bakal *Omdim B'Yachad*. Kini, *Omdim B'Yachad (Standing Together)* menjadi gerakan akar rumput terbesar dan berkembang pesat di Israel, dengan dua ribu anggota dan lima belas cabang di seluruh negara. Anggota *Omdim B'Yachad* bekerja di tingkat lokal dan nasional untuk isu-isu keadilan sosial, kesetaraan, dan perdamaian. Kampanye yang mereka jalankan mengakui keterkaitan berbagai perjuangan, seperti kesenjangan sosial dan ekonomi serta pendudukan wilayah Palestina yang terus berlanjut (Noa Fleischacke 2020).

Secara singkatnya, dapat dikatakan bahwasanya *Standing Together* adalah sebuah gerakan akar rumput yang berkembang dengan pesat, yang menghubungkan warga Yahudi dan

Palestina di Israel yang didirikan pada tahun 2015, dengan tujuan untuk menyatukan kedua masyarakat, yaitu Israel dan Palestina tanpa menghilangkan perbedaan yang ada. *Standing Together* juga menentang pendudukan wilayah Palestina yang dilakukan oleh Israel dan percaya bahwa keamanan adalah kunci bagi kedua belah pihak. Gerakan ini juga berusaha untuk menciptakan sebuah alternatif terhadap keadaan yang terjadi saat ini (Amsterdam 2024). Dengan lebih dari 5.000 anggota, gerakan *Standing Together* ini menjadi sebuah gerakan terbesar yang berada di Israel. Setelah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober dan balasan keras dari Israel, *Standing Together* menjadi kekuatan utama dalam melakukan protes dan penuntutan gencatan senjata dan penyelesaian untuk pembebasan para sandera. Inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk memperkuat kerja sama antara warga Yahudi dan Palestina di Israel yaitu mengadakan ‘Jam Tangan Solidaritas’ di berbagai kota, serta memastikan bantuan sampai ke Gaza. Salah satu program mereka yaitu, melakukan penjagaan kemanusiaan gabungan antara Yahudi dan Palestina itu sendiri, melindungi truk-truk bantuan dari kekerasan pemukim, dan menarik perhatian polisi serta dunia internasional, sehingga perjalanan bantuan menuju ke Gaza menjadi aman (VORTRAG 2024).

Perjuangan tanpa kekerasan, seperti yang terlihat dalam aksi-aksi *Standing Together*, merupakan contoh nyata bagaimana solidaritas dan kerjasama dalam perlawanan dapat dilakukan tanpa kekerasan fisik. Aksi ini menunjukkan bahwa melalui kesatuan dan keputusan untuk berdiri bersama, kelompok dapat menyuarakan penolakan atau tuntutan mereka secara damai, meskipun tanpa menggunakan kekerasan sekalipun. Dalam hal ini, *Standing Together* bukan hanya tentang berdiri berdampingan secara fisik, tetapi juga tentang memperkuat solidaritas dan menunjukkan bahwa perjuangan dapat dilakukan dengan kekuatan bersama, tanpa harus menimbulkan kerusakan atau kekerasan. Seiring waktu, semakin banyak orang yang menyadari

pentingnya teknik ini, yang meski sering dimulai secara spontan, mampu menciptakan perubahan signifikan dalam menghadapi ketidakadilan (Gene Sharp 2015).

Alon-Lee Green, Co-direktur nasional gerakan *Standing Together* mengatakan pada *Teen Vogue* saat di wawancara bahwasanya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, *Standing Together* beroperasi sesuai dengan hukum Israel, dan tidak berada di dalam permukiman. Namun, setelah serangan 7 Oktober, Green mengatakan bahwa kepemimpinan *Standing Together* harus segera mengubah fokus mereka untuk bekerja dalam ‘kapasitas darurat’ dan menyadari bahwasanya di depan nanti, pendekatan mereka membutuhkan ‘empati yang mendalam’ untuk mencapai tujuan-tujuan mereka (Emma Sarran Webster 2024). Selain daripada itu, *Standing Together* memiliki ciri khas tersendiri, yaitu gerakan ini menggunakan warna ungu sebagai warna dasar gerakan mereka. Dimana, menurut mereka warna ungu ini disimbolkan sebagai warna yang terpolitisasi atau warna yang tidak terlalu terikat dengan politik di Israel, sehingga tidak dapat dikaitkan dengan sayap kanan maupun kiri. Mereka juga berharap dapat menentang pembagian politik yang ada serta menciptakan gerakan massa baru yang terfokus pada harapan dan perubahan. Selain daripada itu, warna ungu juga melambangkan gerakan feminis internasional. Dimana, mereka percaya bahwa setiap perjuangan yang dilakukan untuk keadilan, harus terkait dengan perjuangan kesetaraan gender pula. *Standing Together* ini juga beroperasi di delapan cabang lokal, yaitu Yerusalem, Tel Aviv, Haifa, Be’er Sheva, the Southern Triangle and Sharon region (Segitiga Selatan dan wilayah Sharon), the Northern Triangle and Emek Menashe (Segitiga Utara dan Emek Menashe), the Galilee Heartland, dan Nazareth and the Valleys, dua belas cabang mahasiswa, dan sebuah cabang iklim tingkat nasional. *Standing Together* juga mengorganisir kampanye nasional dan lokal di seluruh negeri untuk menuntut perdamaian dan diakhirinya pendudukan yang dilakukan, kesetaraan hak bagi semua warga negara, keadilan

sosial, dan keadilan lingkungan. Tidak hanya itu, *Standing Together* juga mengadakan sebuah lokakarya dan seminar tentang membangun kekuatan dan pengorganisasian masyarakat, serta berjuang untuk mendapatkan pengaruh di ruang publik (Standing Together, t.t.-a).

Menurut *Standing Together*, tidak ada operasi militer yang pernah menghasilkan sebuah keselamatan dan keamanan yang bersifat jangka panjang bagi warga Israel, melainkan operasi militer yang semakin dijalankan hanya akan menjadi sebuah bencana besar bagi warga Palestina. Pendudukan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Tepi Barat dan blokade di Gaza pun harus segera diakhiri. Bukan hanya soal kekejaman dan penindasan bagi warga Palestina, melainkan juga tidak dapat menjamin keamanan jangka panjang bagi warga Israel. *Standing Together* juga menyebutkan bahwa perjanjian damai yang dinegosiasikan adalah satu-satunya cara untuk dapat memastikan sebuah kebebasan, keamanan, dan kesetaraan bagi Palestina dan juga Israel. Sebagai sebuah gerakan akar rumput yang progresif, mereka berfokus untuk membangun dukungan di masyarakat Israel, menggerakkan orang Yahudi dan Palestina di Israel untuk meyakini bahwa masa depan bersama itu mungkin terjadi. Mereka menyerukan gencatan senjata total untuk mengakhiri perang selamanya, mengembalikan semua sandera, memulai rehabilitasi masyarakat mereka, dan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan (Standing Together, t.t.-b).

Beberapa waktu lalu, *Standing Together* bersama dengan anggotanya, berbaris bersama di Sheikh Jarrah, sebuah lingkungan yang berada di Yerusalem Timur yang mana penduduknya menghadapi masalah pengucilan dan juga pengusiran dari rumah mereka di tangan para pemukim Yahudi Israel. Mereka juga berdiri bersama dengan orang-orang Arab dan Yahudi, di jantung kota Tel Aviv, dimana ribuan orang dari mereka menuntut realitas yang adil dan damai bagi semua pihak. Mereka menuntut gencatan senjata, diakhirinya permukiman ilegal di wilayah Palestina yang dilakukan oleh Israel, dan mereka juga menyerukan langkah menuju perdamaian

antara Israel dan Palestina. Mereka juga mengambil sikap di Be'er Sheva dan Haifa untuk menentang penangkapan politik. Mereka juga melakukan demonstrasi di Lod bersama warga Palestina dan Yahudi yang ingin bersatu, bukan terpecah belah. Dan mereka kembali melakukan demonstrasi bersama dengan warga Sheikh Jarrah untuk menentang upaya pemukim yang berusaha untuk mengusir mereka dari rumah mereka sendiri. Hal ini adalah bentuk dari misi yang dijalankan oleh para aktivis *Standing Together* yang penuh dengan kekerasan dan peperangan, meskipun cara yang mereka gunakan adalah sebuah cara damai, yaitu berdemonstrasi (“The Power Of Hope: Standing Together in Israel/Palestine” 2021).

Selain daripada itu, untuk mengatasi perang yang terjadi di Gaza, *Standing Together* menawarkan sebuah pendekatan ketiga yaitu sebuah solusi yang tidak berpihak pada Zionis, tidak mendukung Bintang Daud, atau bahkan mendukung Hamas sekalipun sebagai pemberontak untuk melawan penjajahan. Jika ini nampak seperti kemustahilan, dua pemimpin *Standing Together* yaitu, Rula Daood (wanita Palestina-Israel), dan Alon-Lee Green (pria Yahudi-Israel), mereka menunjukkan bahwa persatuan antara Israel dan Palestina masih mungkin untuk terjadi, meskipun banyak yang menganggapnya sebagai suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Kedua pemimpin *Standing Together* ini telah melakukan tur ke Amerika Serikat selama 14 bulan (1 tahun 2 bulan), dengan tujuan untuk membangun gerakan akar rumput terbesar yang percaya bahwa solusi untuk perang di Israel dapat ditemukan melalui aksi ‘*Standing Together*’. Tur mereka mencakup acara di kota-kota besar Amerika, serta melakukan kunjungan kepada pejabat politik terkemuka seperti Senator Bernie Sanders dan Anggota Kongres Alexandria Ocasio-Cortez. Dimana, kedua pemimpin *Standing Together* ini mengatakan bahwa perjalanan yang mereka tempuh untuk dapat melakukan tur ini penuh dengan tantangan karena mereka dihina, diserang, dan diancam. Dalam tur yang mereka lakukan, Daood dan Green mengunjungi

Northampton pada hari Jumat untuk menyampaikan sebuah pesan tentang pentingnya menyikapi konflik Gaza dengan perspektif “kedua pihak” bukan hanya “salah satu atau lainnya”. Green juga menyatakan bahwa mereka mendukung kebebasan Palestina dan juga keselamatan orang Yahudi, serta menekankan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mencari sebuah solusi bukan untuk balas dendam. Green juga menjelaskan bahwa, gerakan *Standing Together* adalah gerakan pertama di Israel yang menggunakan kata “kesepakatan” setelah terjadi serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Menurut Green juga, setiap kesepakatan yang berhasil diperoleh, harus dimulai dengan mengatasi sebuah trauma yang mendalam akibat konflik yang terjadi dan berfokus pada realitas kehidupan orang-orang yang berada di wilayah tersebut, khususnya di Palestina. *Standing Together* juga mengorganisir pengiriman 400 truk berisi makanan dan produk kebersihan ke Gaza yang sangat dibutuhkan oleh mereka, setelah Israel memblokade Gaza. Ini tidak hanya menjadi langkah kemanusiaan, melainkan juga menjadi langkah politik untuk memberdayakan rakyat Gaza yang terancam kekerasan jika mereka membuka suara (Samuel Gelinas 2024).

Dikutip dari website resmi *UK Friends of Standing Together* (UK Friends Standing Together, t.t.), dimana mereka mengatakan bahwa *UK Friends of Standing Together* berfokus untuk memberikan dukungan praktis dan memperkuat upaya *Standing Together* di Israel. Mereka percaya bahwa *co-resistance* (perjuangan bersama) antara warga Yahudi dan Palestina di Israel untuk mencapai masa depan yang setara, merupakan suatu bagian terpenting dalam perubahan demokratis di kawasan Palestina dan Israel. *UK Friends of Standing Together* juga menyadari pentingnya sebuah tekanan diplomatik, dan percaya bahwa pemerintah internasional, termasuk pemerintah UK, harus lebih aktif dalam mendukung perdamaian dan kesetaraan. Oleh karena itu, *UK Friends of Standing Together* meminta para politisi Inggris untuk :

1. Menuntut gencatan senjata permanen dan kesepakatan pembebasan sandera segera; menuntut pembebasan warga Palestina yang ditahan tanpa dakwaan dalam “penahanan administratif”, dan memastikan semua warga Palestina yang ditahan di penjara Israel mendapatkan proses hukum yang adil.
2. Menuntut pemerintah Inggris untuk mengembalikan dan meningkatkan dana untuk UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*)
3. Menuntut pemerintah Inggris menarik izin yang memungkinkan perusahaan-perusahaan Inggris menjual senjata ke Israel, dan menghentikan perdagangan dengan produsen senjata Israel, sementara Israel sedang diselidiki atas dugaan kejahatan perang.
4. Menuntut pemerintah Inggris untuk mengambil tindakan lebih tegas terhadap pendudukan ilegal Israel di Tepi Barat, termasuk perluasan pemukiman yang terus berjalan. Hal ini harus mencakup: melarang badan-badan amal Inggris mendanai proyek-proyek di wilayah yang diduduki oleh Israel; melarang impor barang-barang yang diproduksi di pemukiman; serta menarik RUU Aktivitas Ekonomi Badan Publik (Urusan Luar Negeri), yang dikenal sebagai “*anti-boycott bill*” (RUU anti-boikot).
5. Mendukung pengakuan terhadap Negara Palestina, sebagai bagian dari upaya untuk memulai kembali proses perdamaian yang sejati, yang bertujuan untuk memastikan kesepakatan yang menjamin kedua belah pihak, Yahudi Israel dan Arab Palestina, penentuan nasib sendiri dan hak-hak yang setara.

6. Berkomitmen untuk menghormati independensi Mahkamah Internasional dan Pengadilan Kriminal Internasional, serta menegakkan dan menjalankan keputusan-keputusan mereka.
7. Menggunakan posisi mereka untuk mendukung dan memperkuat pekerjaan *Standing Together* dan gerakan pro-perdamaian, anti-perang, serta anti-pendudukan yang dilakukan oleh Israel yang berjuang untuk masa depan yang berbasis pada kebebasan, hak menentukan nasib sendiri, dan kesetaraan bagi kedua pihak (UK Friends Standing Together, t.t.).

BAB III

ANALISIS AKSI NON-KEKERASAN GERAKAN *STANDING TOGETHER* BERDASARKAN TEORI GENE SHARP

Pada bab 2 sebelumnya, telah dibahas terkait kekerasan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina, dinamika gerakan sosial dan organisasi pro-Palestina yang berada di Israel, dan profil *Standing Together* itu sendiri. Selanjutnya, pada bab 3 ini akan membahas terkait analisis aksi non-kekerasan yang dilakukan oleh gerakan *Standing Together* berdasarkan dengan teori Gene Sharp yang memiliki 3 kategori aksi non-kekerasan, yakni : Protes dan Persuasi, Non-kooperasi, dan Intervensi non-kekerasan.

3.1 Analisis Aksi Non-Kekerasan *Standing Together* berdasarkan Kategori Protes dan Persuasi

Pada kategori protes dan persuasi ini, dijelaskan bahwasanya protes dan persuasi adalah sebuah tindakan yang menggunakan aksi simbolik diantaranya adalah pawai dan parade. Dalam analisis kali ini, aksi non-kekerasan yang dilakukan oleh gerakan sosial *Standing Together* dalam melawan pendudukan dan kejahatan Israel di Palestina tergolong ke dalam aksi simbolik, karena aksi yang dilakukan oleh *Standing Together* bersifat simbolik, terbuka, dan non-kekerasan.

- Kategori pawai yang dilakukan oleh *Standing Together* meliputi aksi untuk menyerukan sebuah perjanjian terkait gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan. Dimana, *Standing Together* telah mengorganisir demonstrasi terbesar yang menyerukan terkait perjanjian gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan sejak tanggal 7 Oktober, serta menarik puluhan ribu orang ke jalan-jalan di seluruh negeri. Selain demonstrasi dan pawai yang dilakukan oleh *Standing Together*, mereka juga bergabung dengan

demonstrasi anti-pemerintah dan pro perjanjian penyanderaan pada sabtu malam di beberapa kota (Standing Together, t.t.-b).

- Kategori Parade menurut Gene Sharp yang tertera pada poin nomor 39, menjelaskan bahwasanya aksi parade ini melibatkan sekelompok orang yang berjalan bersama untuk menarik perhatian pada masalah atau pendapat mereka. Aksi parade juga biasanya menggunakan spanduk, selebaran, atau poster, tetapi hal tersebut tidak selalu dilakukan. Selain itu, parade bisa disertai musik dari band atau aktivitas lain, namun hal ini tidak selalu ada. Dalam hal ini, aksi yang dilakukan oleh Standing Together berdasarkan kategori parade ini mencakup :

- Kampanye publik untuk mempengaruhi wacana. Gerakan *Standing Together* telah menjalankan kampanye publik untuk mempengaruhi pembicaraan di masyarakat. Kampanye ini mendukung solidaritas, kemitraan, dan perdamaian jangka panjang, serta mengutuk pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah di Gaza, Tepi Barat, dan Israel. Mereka menyampaikan pesan yang bertujuan untuk mengembalikan kemanusiaan dalam percakapan, menghormati nyawa yang hilang, dan menolak kekerasan di media sosial, dengan menggunakan bahasa Ibrani, Arab, dan Inggris (Standing Together, t.t.-b).

- *Standing Together* mengadakan kampanye dalam rangka mengumpulkan bantuan untuk Gaza dan menentang kelaparan. Perang di Gaza telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang sangat parah, membuat masalah kelaparan, penyakit, dan penderitaan besar bagi warga Palestina di Jalur Gaza, dan sebagian besar dari mereka adalah pengungsi internal. Pada bulan Agustus, *Standing Together* telah memulai kampanye untuk mengumpulkan makanan dan pasukan bantuan kemanusiaan untuk penduduk Gaza dari beberapa kota Arab – Palestina yang berada di seluruh Israel. Selain bertujuan untuk mengirimkan lebih

banyak bantuan ke Gaza, kampanye ini juga bertujuan untuk memobilisasi warga Palestina dan Yahudi di Israel, memperkuat kemitraan Yahudi-Arab dalam melawan perang. Warga Palestina telah menghadapi penganiayaan politik yang ekstrem sejak awal perang, dan kampanye ini memberikan mekanisme bagi warga Palestina dan Yahudi untuk berpartisipasi dalam aksi akar rumput yang aman, yang akan berdampak langsung pada kehidupan warga Gaza, serta menentang tindakan pemerintah yang menyebabkan kelaparan dan hukuman kolektif. *Standing Together* berhasil memobilisasi puluhan ribu warga Palestina dan Yahudi di seluruh negara, serta mengumpulkan lebih dari 400 truk yang berisi makanan dan bantuan (Standing Together, t.t.-b).

- *Standing Together* melakukan aksi berbaris bersama di Sheikh Jarrah, sebuah lingkungan yang berada di Yerusalem Timur yang mana penduduknya menghadapi masalah pengucilan dan juga pengusiran dari rumah mereka di tangan para pemukim Yahudi Israel. Mereka juga berdiri bersama dengan orang Arab dan Yahudi, di jantung kota Tel Aviv, dimana ribuan orang dari mereka menuntut realitas yang adil dan damai bagi semua pihak. Mereka menuntut gencatan senjata, diakhirinya permukiman ilegal di wilayah Palestina yang dilakukan oleh Israel, dan mereka juga menyerukan langkah menuju perdamaian antara Israel dan Palestina. Mereka juga mengambil sikap di Be'er Sheva dan Haifa untuk menentang penangkapan politik. Mereka juga melakukan demonstrasi di Lod bersama warga Palestina dan Yahudi yang ingin bersatu, bukan terpecah belah. Dan mereka kembali melakukan demonstrasi bersama dengan warga Sheikh Jarrah untuk menentang upaya pemukim yang berusaha untuk mengusir mereka dari rumah mereka sendiri ("The Power Of Hope: Standing Together in Israel/Palestine" 2021).

3.2 Analisis Aksi Non-Kekerasan *Standing Together* berdasarkan Kategori Non-kooperasi

Perlu diketahui bersama, bahwasanya kategori non-kooperasi sesuai dengan teori Gene Sharp terdapat 3 bagian utama di dalamnya, yakni non-kooperasi sosial, non-kooperasi politik, dan non-kooperasi ekonomi. Dalam hal ini, kategori non-kooperasi yang digunakan oleh *Standing Together* adalah non-kooperasi politik. Non-kooperasi politik dapat dilakukan untuk menyatakan protes, menghentikan berfungsinya unit politik, atau berkontribusi pada pembubaran pemerintahan (Gene Sharp 2015). Pada bagian *Theory of Change Standing Together*, mereka juga mengatakan bahwasanya mereka menolak sebuah kerangka politik yang bersifat kaku dan usang, yang membatasi pilihan politik berdasarkan dengan etnis, kelas, agama, atau wilayah, dan hanya memperkuat kekuasaan yang sudah ada. *Standing Together* juga menentang terkait narasi palsu bahwa sayap kanan mewakili kepentingan rakyat, padahal kenyataannya justru mereka sangat merugikan rakyat. Dalam hal oini, *Standing Together* berusaha untuk mengguncang struktur politik yang mapan, membangun aliansi lintas batas, dan menciptakan bahasa politik baru yang berakar pada kenyataan sosial dan berpihak pada kepentingan bersama (*Standing Together* 2019).

Sehingga, dapat dikatakan bahwasanya aksi non-kooperasi politik (aksi boikot politik) yang dilakukan oleh *Standing Together* adalah mendesak pemerintah Israel untuk segera membebaskan para sandera dan melakukan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Namun, *Standing Together* dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan Netanyahu merupakan penghalang utama untuk mewujudkan upaya tersebut. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa langkah yang paling diperlukan untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah dengan menggelar protes massa yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan

Netanyahu, serta mendesak agar pemilihan umum diadakan lebih awal demi memastikan perubahan yang lebih adil dan damai (Uri Weltmann dan Federico Fuentes 2024).

Selain daripada itu, AS mendapat tekanan dari anggota parlemen agar tidak menghadiri pidato Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Dimana, dalam hal ini sejumlah organisasi masyarakat sipil membentuk koalisi baru yang akan menggelar aksi protes terhadap Netanyahu terkait pidatonya yang berisi ajakan untuk melanjutkan perang di Gaza, dan mengabaikan keselamatan sandera. Koalisi tersebut terdiri dari *American Friends of Combatants for Peace*, *Win Without War*, *T'ruah*, *Sisterhood of Salaam Shalom*, *Israelis for Peace*, *Halachic Left*, serta tiga cabang lokal dari *Supporters of Standing Together*. Koalisi ini juga terdiri dari ratusan warga Israel, Palestina, Arab, Yahudi, dan sekutu lainnya yang menyatakan bahwasanya perjuangan bersama dan pembebasan kolektif adalah hal yang mungkin. Dalam hal ini, koalisi tersebut yang diwakili oleh 2 organisasi yaitu *Council on American Islamic Relations* dan *CodePink* menyebarkan terkait petisi untuk mendesak para anggota kongres agar memboikot pidato yang akan dilaksanakan oleh Netanyahu di Washington (Brett Wilkins 2024).

3.3 Analisis Aksi Non-Kekerasan *Standing Together* berdasarkan Kategori Intervensi Non-Kekerasan

Dalam teori Gene Sharp, kategori intervensi non-kekerasan terbagi menjadi dua poin, yaitu intervensi negatif, dan intervensi positif. Dalam hal ini, aksi yang dilakukan *Standing Together* meliputi aksi pada poin intervensi positif yakni berusaha untuk membentuk pola perilaku, kebijakan, hubungan, atau institusi baru yang lebih adil dan lebih baik.

Beberapa aksi yang dilakukan oleh *Standing Together* berdasarkan teori intervensi non-kekerasan positif yakni :

- a. *Standing Together* meluncurkan Penjagaan Kemanusiaan (*Humanitarian Guard*), dimana mereka membawa para aktivis ke pos pemeriksaan Tarqumiyah untuk menjaga truk bantuan yang akan menuju Gaza dari serangan pemukim ekstremis yang datang untuk menyerang truk-truk tersebut. Sebelum mereka meluncurkan penjagaan kemanusiaan ini, polisi Israel tidak cukup bertindak untuk mencegah serangan atau bahkan menangkap pelaku, namun dengan adanya penjaga kemanusiaan di pos tersebut, kehadiran polisi meningkat dan serangan-serangan tersebut menghadapi sebuah konsekuensi hukum. Tindakan ini memastikan bahwa semua truk bantuan yang lewat di depan pos pemeriksaan Tarqumiyah dapat sampai ke tujuannya yaitu Gaza, sekaligus meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat Israel terkait serangan-serangan tersebut dan mendorong mereka untuk memperjuangkan kemanusiaan bersama.
- b. Pengurangan ketegangan dan Solidaritas di Israel. Setelah perang dimulai, *Standing Together* membuka 12 jaringan solidaritas di seluruh negara, di mana lebih dari 5.000 aktivis Yahudi dan Palestina terlibat dalam berbagai aksi yang mempromosikan solidaritas dan pengurangan ketegangan. Beberapa sorotan dari kegiatan tersebut yakni : Patroli “*Solidarity Watch*” yang berfungsi untuk mendampingi atau menemani orang-orang yang takut keluar dari rumah mereka, menggabungkan upaya untuk bantuan kemanusiaan dan saling membantu, melakukan pertemuan tatap muka dan virtual untuk menyediakan sebuah dialog yang aman dan terbuka, memantau dan melaporkan terkait ajakan kekerasan, diskriminasi, dan berita palsu di media sosial, media transnasional, dan melaporkan kepada pihak yang berwenang, menekan polisi lokal dan juga media untuk turun tangan dalam kasus kekerasan antar kelompok, mempromosikan pesan positif dan wacana solidaritas di ruangan terbuka, serta melatih orang untuk mengurangi ketegangan

dalam melakukan percakapan yang dapat berpotensi untuk memicu konflik di ruang bersama seperti kantor, atau sekolah.

- c. Kedua pemimpin *Standing Together* ini telah melakukan tur ke Amerika Serikat selama 14 bulan (1 tahun 2 bulan), dengan tujuan untuk membangun gerakan akar rumput terbesar yang percaya bahwa solusi untuk perang di Israel dapat ditemukan melalui aksi ‘*Standing Together*’. Tur mereka mencakup acara di kota-kota besar Amerika, serta melakukan kunjungan kepada pejabat politik terkemuka seperti Senator Bernie Sanders dan Anggota Kongres Alexandria Ocasio-Cortez. Dimana, kedua pemimpin *Standing Together* ini mengatakan bahwa perjalanan yang mereka tempuh untuk dapat melakukan tur ini penuh dengan tantangan karena mereka dihina, diserang, dan diancam. Dalam tur yang mereka lakukan, Daood dan Green mengunjungi Northampton pada hari Jumat untuk menyampaikan sebuah pesan tentang pentingnya menyikapi konflik Gaza dengan perspektif “kedua pihak” bukan hanya “salah satu atau lainnya”. Green juga menyatakan bahwa mereka mendukung kebebasan Palestina dan juga keselamatan orang Yahudi, serta menekankan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mencari sebuah solusi bukan untuk balas dendam (Samuel Gelinas 2024).

3.4 Tantangan dan Ancaman Terhadap gerakan *Standing Together*

Dalam sebuah gerakan sosial, ancaman dan tantangan itu pasti selalu ada. Sama halnya dengan gerakan *Standing Together* ini. Dimana, mereka mendapat penolakan atau kritik dari PACBI terkait misi, tujuan, dan gerakan non kekerasan yang dilakukan oleh *Standing Together* itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2 terkait gerakan BDS, yang mana gerakan itu adalah sebuah gerakan koalisi masyarakat Palestina untuk menentang kekejaman, kejahatan serta pendudukan ilegal yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. PACBI (*Palestinian*

Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel) yang didirikan pada tahun 2004, dan merupakan anggota pendiri Komite Nasional gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS). Dimana, PACBI menyerukan boikot terhadap institusi akademik dan budaya Israel berdasarkan keterlibatannya dalam melaksanakan, membersihkan, atau membenarkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim apartheid dan penduduk militer ilegal Israel di wilayah Palestina, termasuk pembatasan kebebasan bergerak dan kebebasan berekspresi (Shado Magazine, t.t.).

PACBI menghimbau orang-orang, organisasi, serta serikat di seluruh dunia untuk tidak terlibat dengan *Standing Together*, sebuah organisasi normalisasi Israel yang berusaha mengalihkan perhatian dan membersihkan citra genosida yang sedang berlangsung di Gaza yang dilakukan oleh pasukan Israel. PACBI menganggap bahwa *Standing Together* mencoba untuk menggambarkan Israel sebagai sebuah negara yang toleran, beragam, dan normal, dengan fokus pada “kebencian” daripada penindasan sebagai akar masalah, yang membuat gerakan *Standing Together* secara intelektual bersifat tidak jujur dan sepenuhnya terlibat dalam kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Mereka memainkan peran penting dalam strategi propaganda internasional Israel yang dapat dilihat dari upaya visibilitas *Standing Together* yang mendadak berada di luar negeri untuk melibatkan dunia dalam narasi-narasi Israel yang terlibat, terutama pada saat Israel sedang diadili di Pengadilan Internasional atas tuduhan genosida yang dilakukan di Gaza dan saat Palestina menyerukan isolasi Israel apartheid sebagai respons terhadap genosida tersebut. Selain itu juga, menurut PACBI premis *Standing Together* adalah bahwa perdamaian dapat tercapai antara Palestina dan Israel jika mereka menanggalkan kebencian dan lebih memilih empati. PACBI juga menyebutkan bahwa gerakan *Standing Together* mengklaim dapat menggerakkan warga negara Yahudi dan Palestina yang berada di Israel untuk mengejar

perdamaian, kesetaraan, dan keadilan sosial serta iklim. Tetapi *Standing Together* gagal membahas isu utama, yaitu rezim kolonialisme pemukim dan apartheid Israel yang sudah berlangsung selama 75 tahun, yang merupakan akar penyebab dari konflik dan juga kekerasan itu terjadi. Pendekatan tersebut mirip dengan saran moral yang sudah tidak relevan bagi orang-orang Afrika Selatan yang melawan apartheid di masa lalu untuk menghindari kebencian dan konflik, serta merangkul perdamaian dan empati tanpa menyerukan penghentian apartheid (PACBI 2024).

Menurut PACBI, *Standing Together* tidak mengakui kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel berupa apartheid, yang telah diakui tidak hanya oleh aktivis organisasi Palestina saja, melainkan juga oleh organisasi hak asasi manusia terkemuka seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch*. Sebagai gantinya, *Standing Together* hanya berbicara mengenai mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Palestina, bahkan dengan kerangka kerja yang menyamakan tanggung jawab antara Israel dan Palestina dalam penindasan yang terjadi. Hal ini dikatakan sebagai penciptaan kesetaraan palsu antara penindasan struktural oleh penjajah Israel dan penindasan yang dialami oleh Palestina yang terjajah. *Standing Together* menghindari pembahasan tentang tanggung jawab moral dan hukum negara, institusi, dan perusahaan untuk mengakhiri keterlibatan mereka dalam sistem ketidakadilan Israel, terutama ketika Israel sedang melakukan genosida yang disiarkan langsung kepada dunia terhadap 2,3 juta orang Palestina di Gaza yang terjajah dan terkepung. PACBI merupakan bagian penting dari kepemimpinan Palestina dalam gerakan BDS global, yang mendapat dukungan mayoritas masyarakat Palestina di Palestina historis dan di pengasingan, termasuk entitas yang mewakili warga negara Palestina di Israel. PACBI mengakui normalisasi sebagai strategi utama negara Israel, yang merupakan bentuk kekerasan terhadap rakyat mereka, di mana negara Israel berusaha mengkolonisasi

pikiran rakyat Palestina, membuat pendudukan, apartheid, dan kolonialisme pemukim terlihat normal. Sebagai respons, anti-normalisasi adalah taktik penting yang mengajak orang untuk menolak berpartisipasi dalam proyek, acara, atau kegiatan yang mempromosikan normalitas negara Israel sebagai entitas sah atau yang menciptakan kesetaraan antara penindas dan yang tertindas. PACBI dengan tegas meminta orang-orang dan kelompok-kelompok yang memiliki hati nurani di seluruh dunia untuk tidak terlibat dengan gerakan *Standing Together* ini, yang berusaha mengalihkan perhatian dari tindakan penting yang diperlukan untuk menghentikan genosida yang sedang berlangsung oleh Israel dan membongkar rezim apartheidnya, yang terus memperpanjang penindasan brutal terhadap Palestina. Keadilan yang ditunda adalah keadilan yang ditolak (PACBI 2024). Selain daripada itu menurut PACBI, *Standing Together* berusaha untuk menutupi genosida Israel yang sedang berlangsung di Gaza, dan kelompok gabungan Palestina dan Yahudi yang memiliki 5.000 anggota ini adalah salah satu suara di dalam Israel yang hanya menyerukan gencatan senjata dan penghentian pendudukan saja (Levine 2024).

PACBI menuduh bahwasanya tidak ada aktivitas dari *Standing Together* yang ‘menormalisasikan’ pendudukan Israel dan kebijakan perang. *Standing Together* telah menggerakkan ribuan orang untuk berdemonstrasi menentang perang Israel, menyuarakan dengan tegas terkait penderitaan yang dialami oleh rakyat Gaza, dan para aktivisnya secara konsisten mendukung upaya melawan kekerasan pemukim di Tepi Barat. PACBI mengakui bahwa, memang *Standing Together* tidak mengusung sebuah pandangan bahwa kemajuan hanya dapat tercapai apabila Israel dihancurkan (dihapus, dibubarkan, atau bahkan ditaklukkan) daripada reformasi, meskipun dengan cara yang radikal. Dikutip dari laman *Workers Liberty*, mengatakan bahwasanya kritik PACBI terhadap kegiatan *Standing Together* merupakan campuran distorsi dan juga kebohongan, dan perbedaan politik itulah yang tampaknya menjadi

alasan utama dibalik adanya kritik dan juga seruan untuk memboikot dan mengisolasi gerakan *Standing Together* ini. Padahal, pemimpin-pemimpin *Standing Together* secara eksplisit mengkritik ‘retorika genosida’ dari para pemimpin Israel. Beberapa aktivis lainnya memang menggunakan sebuah istilah ‘kolonialisme pemukim’ dan ‘apartheid’, meskipun dalam komunikasi resmi mereka lebih memilih menggunakan istilah yang lebih sederhana seperti ‘pemukim’ dan ‘pendudukan’. Namun bagi PACBI, sekeras apapun *Standing Together* berusaha memobilisasi untuk menentang pemerintah Israel, *Standing Together* tetap layak untuk diboikot kecuali *Standing Together* mengadopsi satu perspektif politik tertentu dan menggunakan bahasa atau kata yang terkait dengan perspektif tersebut (Ollie Moore 2024).

Padahal, kegiatan *Standing Together* sangat penting untuk perjuangan rakyat Palestina. Dimana, pada tahun 2024 *Standing Together* mengorganisir demonstrasi terbesar untuk menghentikan perang di Israel, terlibat dalam demonstrasi anti-pemerintah dengan seruan untuk penghentian perang dan kesepakatan sandera, mendukung Palestina dan Israel yang menjadi korban karena berbicara menentang perang, mengorganisir Pengawal Kemanusiaan, menghalangi fasis kanan di Israel yang memblokir bantuan ke Gaza dan baru-baru ini mengorganisir pengumpulan bantuan yang mengirimkan 400 truk bantuan ke Gaza dan Tepi Barat. Boikot BDS terhadap *Standing Together* dan dukungan dari beberapa pihak pro Palestina menjadi contoh lain bagaimana BDS justru tidak produktif dalam meraih bantuan dan hak-hak bagi Palestina (Owen Flood 2025).

Selain mendapat kritik dari PACBI, *Standing Together* juga harus menghadapi pernyataan proposal Donald Trump untuk memindahkan seluruh penduduk Gaza. Dikutip dari laman *Workers Liberty*, *Standing Together* dalam merespon hal ini mengatakan bahwasanya pemindahan paksa dua juta orang Palestina tidak akan pernah terjadi. *Standing Together*

mengatakan bahwa, mereka yang mendukung rencana tersebut akan membenarkan kondisi perang yang akan semakin berlarut-larut di Israel dan juga Palestina. Namun, *Standing Together* menekankan bahwa ada alternatif yang lebih baik dalam merespons konflik antara Israel dan Palestina, yaitu melalui perdamaian yang menguntungkan semua pihak. *Standing Together* menyoroti bagaimana beberapa politisi Israel seperti Netanyahu dan anggota kabinet sayap kanan seperti Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir, justru menyambut baik pernyataan Trump tersebut. Bagi mereka, ini memberikan alasan untuk melanjutkan perang, menghancurkan Gaza lebih lanjut, dan memperparah situasi tanpa harus bertanggung jawab atas kehancuran yang terjadi. Dalam pandangan mereka, upaya ini juga membuka jalan untuk aneksasi Tepi Barat, yang pada akhirnya akan menambah korban dan berlanjutan kesedihan. *Standing Together* menegaskan bahwa para aktivis dan anggota *Standing Together* tidak boleh terjebak dalam rencana mereka, dan bahwa solusi yang lebih baik adalah melalui perdamaian Israel-Palestina.

Muhammad, seorang guru dari Gaza, dalam pesannya menyatakan bahwa tanah Gaza adalah tanah mereka yang telah dihuni oleh nenek moyang mereka dan mereka tidak akan pernah meninggalkannya. Mereka ingin hidup berdampingan dengan tetangga mereka dalam perdamaian, dan berharap agar konflik ini tidak berlanjut. Sementara itu, Trump menyarankan rencana yang lebih mengarah pada pembersihan etnis sebagai upaya untuk memperluas wacana yang dapat diterima tentang konflik ini. Pernyataannya mengenai Gaza yang akan dibeli dan dimiliki AS menunjukkan ketidakkonsistenan dalam kebijakan ini. Pemerintah Israel yang berhaluan kanan telah lama mendukung pemindahan massal, dan kini mereka merasa mendapat dorongan dari pernyataan Trump tersebut. Di sisi lain, Benny Gantz dan Yair Lapid dari oposisi Israel juga merespons secara ambigu terhadap proposal tersebut. Selain itu, Trump juga menarik dana untuk UNRWA, badan PBB yang mendistribusikan bantuan kepada Palestina, serta

mengurangi tekanan terhadap organisasi pemukim dan pengadilan internasional yang berusaha menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang. Kebijakan ini juga mencakup strategi serangan terhadap Iran, meskipun beberapa anggota pemerintah AS mendukung tindakan agresif terhadap negara tersebut. Dalam konteks ini, *Standing Together* terus melanjutkan kampanye bantuan untuk Gaza, mengirimkan perlengkapan musim dingin untuk para pengungsi yang tinggal di tenda, dan memperjuangkan perdamaian yang lebih bermartabat bagi Gaza. *Standing Together* juga mengorganisir demonstrasi lokal di Israel untuk mendesak agar gencatan senjata diteruskan dan perdamaian yang lebih adil dapat tercapai. Gerakan ini berfokus pada perubahan sosial di Israel dan membangun oposisi terhadap nasionalisme ekstrem pemerintah saat ini (Ira Berkovic 2025).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Konflik antara Israel dan Palestina adalah sebuah permasalahan yang telah berlangsung lama, dengan akar permasalahan yang melibatkan klaim wilayah oleh kedua belah pihak atas tanah yang mereka anggap sebagai rumah mereka. Konflik keduanya mencakup berbagai isu utama, termasuk status Yerusalem, perbatasan, hak pengungsi Palestina, dan kebijakan pendudukan Israel di Tepi Barat dan Gaza. Pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas melakukan serangan besar-besaran kepada Israel yang melibatkan peluncuran roket sebanyak 5.000 roket yang diikuti masuknya sejumlah kendaraan ke wilayah Israel itu sendiri. Sebagai respons, Israel membalas perbuatan Hamas dengan melancarkan serangan melalui udara, laut, maupun darat di wilayah Gaza, yang mengakibatkan banyak korban jiwa, dan luka-luka di wilayah kedua belah pihak tersebut, serta memperburuk situasi kemanusiaan antara Israel dan Palestina.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelanggaran HAM serta kejahatan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina telah didokumentasikan oleh banyak organisasi PBB serta kelompok Hak Asasi Manusia internasional, termasuk *Amnesty International* dan *Human Rights Watch*, bahkan didokumentasikan oleh kelompok hak asasi manusia Israel. Telah banyak usaha dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Israel dan Palestina ini. Namun, masih tidak menemui titik indah dibalik usaha yang telah diupayakan. Sebab, Pemerintah Amerika dan sekutu-sekutunya di Barat memperlakukan Israel sebagai sebuah negara yang kebal hukum dan juga memberikan perlindungan kepada Israel untuk terus memperpanjang kejahatan pendudukan dan menindas orang-orang Palestina, membiarkan Israel

melakukan perbuatan eksploitasi untuk mengambil lebih banyak tanah Palestina dan melakukan Yahudisasi terhadap tempat-tempat suci yang berada di palestina. Meskipun PBB telah banyak mengeluarkan resolusi untuk mendukung rakyat Palestina selama 75 tahun, Israel selalu menolak untuk mematuhi resolusi-resolusi tersebut, dan veto AS selalu hadir di Dewan Keamanan PBB untuk mencegah terkait kecaman terhadap kebijakan dan pelanggaran Israel. Selain upaya dari pihak-pihak yang berwenang untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, ada juga beberapa gerakan sosial yang berupaya untuk menekan Israel agar menghentikan kebijakan, kejahatan dan praktik yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu gerakan yang memberikan tekanan ekonomi, politik, dan sosial kepada Israel adalah gerakan BDS (*Boycott, Divestment, and Sanctions*) dan secara signifikan gerakan BDS ini telah mempengaruhi persepsi dan tindakan global terhadap pemboikotan produk-produk Israel, mulai dari makanan, teknologi, sampai aplikasi sekalipun.

Dalam upayanya merespon kejahatan yang terjadi antara Israel dan Hamas, gerakan *Standing Together* melakukan beberapa upaya kepada rakyat Palestina, yakni mencakup ; demonstrasi yang menyerukan sebuah perjanjian gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan, Kampanye publik untuk mempengaruhi wacana, kampanye dalam rangka mengumpulkan bantuan untuk Gaza dan menentang kelaparan, *Humanitarian guard*, Pengurangan ketegangan dan solidaritas di Israel, Dukungan untuk korban diskriminasi dan penganiayaan, serta Dukungan untuk mahasiswa. Namun, dalam menjalankan aksinya untuk memperjuangkan hak-hak warga Palestina, dan memperjuangkan perdamaian dan keamanan di wilayah Israel dan Palestina, *Standing Together* masih harus tetap melewati tantangan dan juga hambatan yang ada. Dimana, *Standing Together* mendapat sebuah kritikan dari PACBI. Dimana, PACBI menyerukan boikot terhadap institusi akademik dan budaya Israel berdasarkan

keterlibatannya dalam melaksanakan, membersihkan, atau membenarkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim apartheid dan penduduk militer ilegal Israel di wilayah Palestina, termasuk pembatasan kebebasan bergerak dan kebebasan berekspresi. Selain daripada itu, PACBI juga menghimbau orang-orang, organisasi, serta serikat di seluruh dunia untuk tidak terlibat dengan *Standing Together*, sebuah organisasi normalisasi Israel yang berusaha mengalihkan perhatian dan membersihkan citra genosida yang sedang berlangsung di Gaza yang dilakukan oleh pasukan Israel. PACBI menganggap bahwa *Standing Together* mencoba untuk menggambarkan Israel sebagai sebuah negara yang toleran, beragam, dan normal, dengan fokus pada “kebencian” daripada penindasan sebagai akar masalah, yang membuat gerakan *Standing Together* secara intelektual bersifat tidak jujur dan sepenuhnya terlibat dalam kekejaman yang dilakukan oleh Israel.

Meskipun demikian, *Standing Together* tidak mundur untuk tetap berjuang bersama dengan para aktivis Yahudi dan Palestina di Israel dalam mendesak para pasukan Israel untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, dan melawan pendudukan ilegal yang dilakukan oleh para pasukan Israel. Cara-cara yang digunakan oleh *Standing Together* untuk mendesak gencatan senjata, melawan pendudukan ilegal Israel di Palestina adalah cara-cara non kekerasan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian kerangka pemikiran, teknik khusus dalam kasi non kekerasan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Protes dan persuasi, Non-kooperasi, dan Intervensi non-kekerasan. Dan upaya serta cara yang digunakan oleh *Standing Together* untuk menanggapi permasalahan ini tergolong dalam kategori protes dan persuasi. Sebab, aksi yang dilakukan oleh *Standing Together* kebanyakan menggunakan tindakan simbolik seperti demonstrasi, pawai, kampanye, dan tindakan-tindakan non kekerasan lainnya.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, bahwasanya Gerakan *Standing Together* telah berupaya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, memperjuangkan perdamaian, kesetaraan, dan juga solidaritas serta melawan pendudukan ilegal israel di wilayah Palestina meskipun mendapat kritik dari gerakan lokal Palestina, yaitu PACBI serta tantangan baru yang berkaitan dengan pernyataan Donald Trump terkait pemindahan seluruh penduduk Gaza. Dalam penelitian ini pastinya terdapat keterbatasan dalam segi topik maupun cakupan. Penelitian ini hanya terfokus kepada peran *Standing Together* dalam melawan pendudukan Israel di Palestina serta memperjuangkan perdamaian, keamanan, dan kesetaraan untuk kedua belah pihak. Sehingga, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat membahas terkait pengaruh media sosial dalam kesuksesan gerakan sosial *Standing Together* untuk memperluas jangkauan dukungan internasional dalam melawan Israel dengan kekuatan non kekerasan. Hal ini dapat memberikan gambaran terkait solidaritas internasional untuk bersatu memperjuangkan hak-hak Palestina yang telah direnggut oleh pasukan Israel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gene Sharp. 2015. *How Nonviolent Struggle Works*.
<http://archive.org/details/HNVSWUpdatedJan2015>.
- Hanafi, Sari. 2010. "10 Israel and Palestine: Civil Societies in Despair." Dalam *Civil Society and Peacebuilding*, disunting oleh Thania Paffenholz, 207–34. Lynne Rienner Publishers. <https://doi.org/10.1515/9781685856878-011>.
- Standing Together. 2019. *Change Together: Standing Together's Theory of Change*.
<https://www.standing-together.org/en/about-en>.

Artikel Jurnal

- Emma Sarran Webster. 2024. "This Jewish-Arab Movement Is 'Standing Together' Against the War In Gaza." *Teenvogue*, April.
<https://www.teenvogue.com/story/how-standing-together-is-keeping-hope-alive-after-more-than-6-months-of-war>.
- Gawerc, Michelle I. 2017. "Solidarity Is in the Heart, Not in the Field: Joint Israeli–Palestinian Peace Movement Organizations during the 2014 Gaza War." *Social Movement Studies* 16 (5): 520–34.
<https://doi.org/10.1080/14742837.2017.1344544>.
- Iklima Nur Sya`bani, Evita Putri, Nashrulloh Al Hasani, Queentoqo Haura, dan Budi Ardianto. 2024. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Warga Sipil di Palestina: Tinjauan Hukum Internasional dan Upaya Penyelesaian." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2 (3): 402–12.
<https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3468>.
- Jabir, Nur Isma. 2024. "Kegagalan Implementasi Responsibility To Protect (R2P) Dalam Konflik Israel–Palestina."
- Lewiandy, dan Alessandro Christian Max. 2024. "Pelanggaran Ham Dalam Konflik Israel dan Palestina," Juni. <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/2003/1596/>.
- Marpaung, Veny Pasuria, Gladi Agustina Sihombing, Haliza Maulida, Ahmad Ridho, dan Budi Ardianto. 2024. "Serangan Militer Israel Di Jalur Gaza: Pertanggung Jawaban Pidana Berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1 (5): 18–28.
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.371>.
- Muchsin, Misri A. 2015. "Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 39 (2).
<https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.32>.
- Muhamad, Simela Victor. t.t. "Konflik Terbuka Palestina-Israel dan Pentingnya Menghidupkan Kembali Perundingan Damai."
- Novi Thusyifa, Dan Nur Asia. 2024. "Analysis Of The Power Of Social Media Messages In The All Eyes On Raffah Movement" 3. <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/ahsan/article/view/951/627>.
- Nugraha, Ahmad Helmi, Karolina Lamtiur Dalimunthe, Zainal Abidin, dan Yuliana Hanami. 2024. "Gerakan Sosial Aksi Boikot Melalui Social Identity Model of

- Collective Action Pada Isu Bela Palestina.” *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 11 (2): 82–94. <https://doi.org/10.24036/scs.v11i2.685>.
- Prawira, Indra, Rahmat Edi Irawan, dan Karen Karen. 2021. “Objektivitas Tiga Media Siber Indonesia: Studi Konten Berita Konflik Israel-Palestina.” *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 6 (2): 95. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.35073>.
- Setiawan, Irfan. 2024. “Eskalasi Konflik Palestine-Israel di Tahun 2023: Perspektif Kebijakan Luar Negeri Indonesia.” *Jurnal Hubungan Internasional* 17 (1): 248–63. <https://doi.org/10.20473/jhi.v17i1.52392>.
- Simanjorang, Bartolomeus Marulitua, Bayu Ardian SyahPutra, M. Habib Husin, Iren Br Bangun, Nadira Zawani, Thereza Dwi Ningrum Siburian, Zoan Gaharu Perangin-Angin7, dan Prayetno. 2023. “Pengaruh Konflik Palestina Dengan Israel Terhadap Gerakan Perlawanan Hamas Dan Dampaknya Bagi Indonesia.” *Mediation : Journal of Law*, November, 24–30. <https://doi.org/10.51178/mjol.v2i2.1591>.

Website

- “About B’Tselem | B’Tselem.” t.t. Diakses 26 Februari 2025. http://www.btselem.org/about_btselem.
- “About Gush Shalom - Gush Shalom - Israeli Peace Bloc.” t.t. Diakses 26 Februari 2025. http://zope.gush-shalom.org/home/en/about/general_info/.
- ALLMEP. t.t. “ALLMEP Member Standing Together in London: Mobilizing for Peace and Equality in Israel-Palestine.” Alliance for Middle East Peace. Diakses 18 April 2025. <https://www.allmep.org/allmep-resources/allmep-member-standing-together-in-london-mobilizing-for-peace-and-equality-in-israel-palestine/>.
- Amnesty International. 2024. “Amnesty concludes Israel is committing genocide in Gaza.” 12 Mei 2024. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/12/amnesty-international-concludes-israel-is-committing-genocide-against-palestinians-in-gaza/>.
- Amsterdam, Universiteit van. 2024. “Standing Together: What Can We Learn from This Jewish Arab Grassroots Movement for Justice? - AUC Student Information.” AUC Studentensite (EN) - University of Amsterdam. 17 September 2024. <https://student.auc.nl/shared-content/events/2024/09/uva-event-standing-together.html>.
- “Breaking the Silence › The Organization.” t.t. Breaking the Silence. Diakses 26 Februari 2025. <https://www.breakingthesilence.org.il/about/organization>.
- Brett Wilkins. 2024. “Calls to Boycott Netanyahu Speech Grow as Israeli PM Heads to DC | Common Dreams.” 22 Juli 2024. <https://www.commondreams.org/news/netanyahu-congress-boycott>.
- Darningtyas, Raditya Putranti. 2020. “Transnasionalisasi Gerakan Nirkekerasan: Kemunculan Gerakan Boycott, Divestment, dan Sanctions (BDS) Palestina.” Universitas Gadjah Mada. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/185869>.
- Dian Erawati, 150501018. 2022. “Gerakan Syekh Ahmad Yasin Dan Misi Pembebasan Palestina.” Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20087/>.
- GCR2P. 2024. “Israel and the Occupied Palestinian Territory.” Global Centre for the Responsibility to Protect. 1 Desember 2024. <https://www.globalr2p.org/countries/israel-and-the-occupied-palestinian-territory/>.

- Human Rights Watch. 2023. "Tanya Jawab soal Penggunaan Fosfor Putih oleh Israel di Gaza dan Lebanon | Human Rights Watch." 19 Oktober 2023. <https://www.hrw.org/id/news/2023/10/19/questions-and-answers-israels-use-white-phosphorus-gaza-and-lebanon>.
- ICAHD. t.t. "Our Mission and Vision." ICAHD. Diakses 27 Februari 2025. <https://icahd.org/our-mission-and-vision/>.
- IhsanAdel. 2024. "Unlawful Occupation as Ongoing Aggression: Israel and Palestine." *Law for Palestine* (blog). 15 November 2024. <https://law4palestine.org/rethinking-international-law-after-gaza-symposium-unlawful-occupation-as-ongoing-aggression-rethinking-legal-responses-in-the-context-of-palestine/>.
- Ira Berkovic. 2025. "Trump Plan Boosts Israeli Far Right | Workers' Liberty." 12 Februari 2025. <https://www.workersliberty.org/story/2025-02-12/trump-plan-boosts-israeli-far-right>.
- Jewish Voice for Labour. 2024. "'Standing Together' and the Anti-War Left in Israel." Jewish Voice for Labour. 3 Juni 2024. <https://www.jewishvoiceforlabour.org.uk/article/standing-together-and-the-anti-war-left-in-israel/>.
- Kusuma. 2022. "Mengapa Israel Menyerang Gaza pada Awal Agustus 2022 Ini?" *Nusantara Palestina Center* (blog). 14 Agustus 2022. <https://blog.npc.id/mengapa-israel-menyerang-gaza-pada-awal-agustus-2022-ini/>.
- Kusuma. 2024. "Laporan: Inilah Alasan Mengapa Hamas Lakukan Serangan 7 Oktober." *Nusantara Palestina Center* (blog). 10 Februari 2024. <https://blog.npc.id/laporan-inilah-alasan-mengapa-hamas-lakukan-serangan-7-oktober/>.
- Levine, Judith. 2024. "To build an effective movement for Palestine we need every ally." *Revista de Prensa* (blog). 20 Maret 2024. <https://www.almendron.com/tribuna/to-build-an-effective-movement-for-palestine-we-need-every-ally/>.
- Noa Fleischacke. 2020. "Standing Together (Omdim B'Yachad) Against Injustice." *Partners For Progressive Israel* (blog). 26 Maret 2020. <https://www.progressiveisrael.org/standing-together-omdim-byachad-against-injustice/>.
- Nugroho. 2023. "Pertempuran Hamas-Israel 7 Oktober." Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. 30 Desember 2023. <https://www.rri.co.id/internasional/497968/pertempuran-hamas-israel-7-oktober>.
- Ollie Moore. 2024. "Solidarity, Not Boycotts | Workers' Liberty." 30 Januari 2024. <https://www.workersliberty.org/story/2024-01-30/solidarity-not-boycotts>.
- Owen Flood. 2025. "Solidarity Meeting Defies Boycott Calls | Workers' Liberty." 15 Januari 2025. <https://workersliberty.org/story/2025-01-15/solidarity-meeting-defies-boycott-calls>.
- PACBI. 2024. "Standing Together: Serving Apartheid Israel's Propaganda." BDS Movement. 25 Januari 2024. <https://bdsmovement.net/standing-together-normalization>.
- Samuel Gelin. 2024. "Standing Together: Leaders of International Group Present Solution to Gaza War during Visit to Northampton." Daily Hampshire Gazette. 6 Desember 2024. <https://www.gazettenet.com/Co-leaders-of-the-largest-Jewish-Palestinian-Israeli-grassroots-movement-speak-in-Northampton-58334691>.

- Shado Magazine. t.t. “Our Commitment to PACBI.” *Shado Magazine* (blog). Diakses 20 Februari 2025. <https://shado-mag.com/our-commitment-to-pacbi/>.
- Standing Together. t.t.-a. “About.” Standing-Together. Diakses 20 Februari 2025. <https://www.standing-together.org/en/about-en>.
- Standing Together. t.t.-b. “The 2023 War.” Standing-Together. Diakses 20 Februari 2025. <https://www.standing-together.org/en/2023war>.
- “The Power Of Hope: Standing Together in Israel/Palestine.” 2021. AFSEE. 29 Mei 2021. <https://www.cms-else.cloud.contensis.com/en-gb/blogs/the-power-of-hope-standing-together-in-israelpalestine>.
- UK Friends Standing Together. t.t. “What do we want our government to do? | UK Friends of Standing Together.” Diakses 21 Februari 2025. <https://ukfost.co.uk/what-do-we-want-our-government-to-do>.
- UNHR. 2024. “UN Commission Finds War Crimes and Crimes against Humanity in Israeli Attacks on Gaza Health Facilities and Treatment of Detainees, Hostages.” OHCHR. 19 Desember 2024. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/10/un-commission-finds-war-crimes-and-crimes-against-humanity-israeli-attacks>.
- United Nations. 2024. “Over 200 Days of Israeli Atrocities in the Gaza Strip - Letter from the State of Palestine (A/ES-10/990-S/2024/341).” *Question of Palestine* (blog). 25 April 2024. <https://www.un.org/unispal/document/letter-from-the-state-of-palestine-25apr24/>.
- Uri Weltmann, dan Federico Fuentes. 2024. “‘Standing Together’ and the Anti-War Left in Israel.” Jewish Voice for Labour. 3 Juni 2024. <https://www.jewishvoiceforlabour.org.uk/article/standing-together-and-the-anti-war-left-in-israel/>.
- VORTRAG. 2024. “Standing Together - Speaking Tour | forumZFD.” 7 Desember 2024. <https://www.forumzfd.de/en/veranstaltung/standing-together-speaking-tour>.
- Ward, Julie. 2024. “Standing Together.” *Chartist* (blog). 13 Mei 2024. <https://www.chartist.org.uk/standing-together/>.
- “Who We Are.” t.t. Peace Now. Diakses 27 Februari 2025. <https://peacenow.org.il/en/about-us/who-are-we>.
- Zochrot. t.t. “Zochrot - Our Story.” Zochrot - Our Story. Diakses 26 Februari 2025. https://www.zochrot.org/articles/view/17/en?%D9%8BOur_Story.